

***HEDGING BETWEEN GIANTS: ANALISIS PILIHAN KEBIJAKAN LUAR
NEGERI NEPAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN AMERIKA
SERIKAT DAN TIONGKOK (2017-2024)***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Azriel Muvasa Rachmadsyah

21323212

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

***HEDGING BETWEEN GIANTS: ANALISIS PILIHAN KEBIJAKAN LUAR
NEGERI NEPAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN AMERIKA
SERIKAT DAN TIONGKOK (2017-2024)***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AZRIEL MUVASA RACHMADSYAH

21323212

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Hedging Between Giants: Analisis Pilihan Kebijakan Luar Negeri Nepal dalam Menghadapi Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok (2017-2024)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
21 Juli 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Sebagai Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 4 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the exam board members]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 08 Juli 2025,



Azriel Muvasa Rachmadsyah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR SINGKATAN	4
ABSTRAK	5
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Cakupan penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Argumen Sementara	17
1.8 Metode Penelitian	18
1.8.1 Jenis Penelitian	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	18
1.8.4 Proses Penelitian	19
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB II	21
2.1 Persepsi Risiko dan Peluang	21
2.2 Keterlibatan dalam Politik dan Diplomati	26
2.3 Keterlibatan dalam Ekonomi	28
2.4 Limited Balancing	29
2.5 Limited Bandwagoning	33
2.6 Kesimpulan	34
BAB III	37
3.1 Persepsi Risiko dan Peluang	37
3.2 Keterlibatan dalam Politik dan Diplomati	40
3.3 Keterlibatan dalam Ekonomi	42
3.4 Limited Balancing	44
3.5 Limited Bandwagoning	45
3.6 Kesimpulan	45
BAB IV	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen dan kriteria <i>hedging</i> Nepal kepada Amerika Serikat	37
Tabel 2. Komponen dan kriteria <i>hedging</i> Nepal kepada Tiongkok	49
Tabel 3. Komponen dan kriteria <i>hedging</i> Nepal kepada Amerika Serikat dan Tiongkok	55

DAFTAR SINGKATAN

BRI	: Belt Road Initiative
IMP	: Indeks Pembangunan Manusia
MCC	: Millenium Challenge Corporation

DAFTAR ISTILAH

- Millennium Challenge Compact* : Perjanjian antara Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation dan Republik Demokratik Federal Nepal melalui kementerian keuangan.
- Maois* : Partai Komunis Bersatu Nepal
- Nepali Kangres* : Partai Kongres Nepal

ABSTRAK

Dalam posisi geografis yang strategis Nepal menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan otonomi daerahnya dan mendorong kemajuan negaranya. Situasi ini diperparah dengan adanya tawaran-tawaran proyek pembangunan berskala besar dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Nepal menyikapi *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dari Amerika Serikat dan *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok. Dengan menggunakan kerangka strategi hedging Alfred Gerstl, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memahami pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Nepal dalam periode 2017 hingga 2024. Hubungan Nepal dengan Tiongkok diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomi dan perdagangan melalui BRI. Masalah diplomasi *debt trap* muncul ketika negara peminjam gagal mengembalikan uang pinjaman dengan benar. *Hedging* dengan Tiongkok dan Amerika Serikat dapat bermanfaat bagi Nepal jika mengadopsi strategi investasi yang baik. Untuk menghindari diplomasi *debt trap* dari Amerika Serikat dan Tiongkok, uang pinjaman harus diinvestasikan dalam portofolio yang tepat.

Kata Kunci : Nepal, Strategi *Hedging*, *Millennium Challenge Corporation* (MCC), *Belt and Road Initiative* (BRI).

ABSTRACT

With a strategic geographical position, Nepal faces major challenges in maintaining its regional autonomy and advancing its country. This situation is worsened by the offers of large-scale development projects from the United States and China. This thesis will analyze how Nepal responds to the Millennium Challenge Corporation (MCC) from the United States and the Belt and Road Initiative (BRI) from China. Using Alfred Gerstl's hedging strategy framework, this study aims to describe and understand the foreign policy choices taken by Nepal in the period 2017 to 2024. Nepal's relationship with China is expected to bring economic and trade benefits through the BRI. The problem of debt trap diplomacy arises when the borrowing country fails to repay the loan properly. Hedging with China and the United States can be beneficial for Nepal if it adopts a good investment strategy. To avoid debt trap diplomacy from the United States and China, the loan money must be invested in the right portfolio.

Keywords : Nepal, Hedging Strategy, Millennium Challenge Corporation (MCC), Belt and Road Initiative (BRI).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abad ke-21 telah menyaksikan kebangkitan persaingan kekuatan besar, khususnya di Asia Selatan, Amerika Serikat dan Tiongkok yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh melalui berbagai inisiatif ekonomi dan strategis (Thapa 2024, 551). Persaingan baru ini telah terwujud dalam beberapa cara, termasuk pengerahan aset militer, manuver diplomatik, dan, yang paling penting, menggunakan alat ekonomi untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan para aktor regional. Dua inisiatif ekonomi paling menonjol yang membentuk politik Asia Selatan adalah *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dan *Belt and Road Initiative* (BRI) (Thapa 2024, 551-552).

Dalam posisi geografis yang strategis di antara India dan Tiongkok yang merupakan kekuatan-kekuatan Asia yang sedang berkembang pesat, Nepal menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan otonomi daerahnya dan mendorong kemajuan negaranya. Situasi ini diperparah dengan adanya tawaran-tawaran proyek pembangunan berskala besar dari negara-negara adidaya tersebut. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Nepal menyikapi *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dari Amerika Serikat dan *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok. Dengan menggunakan kerangka strategi hedging Alfred Gerstl, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memahami pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Nepal dalam periode 2017 hingga 2024.

Kebijakan luar negeri Nepal didorong oleh keperluannya mempertahankan otonomi kedaulatan dan mendorong pembangunan nasional, terutama karena posisi geopolitiknya yang unik sebagai negara yang terkurung daratan di antara kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit, yaitu India dan Tiongkok (Bastola 2025, 236). Keterlibatan Nepal dengan inisiatif-inisiatif global seperti MCC dan BRI mencerminkan pendekatan yang pragmatis untuk mengamankan manfaat ekonomi dan infrastruktur penting, bersamaan dengan mengelola pengaruh eksternal untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan atau keberpihakan eksklusif dengan satu kekuatan tunggal, sehingga menjaga fleksibilitas strategis dan kepentingan nasionalnya.

Letak geografis dan lintasan sejarah Nepal telah menuntut negara ini untuk menerapkan pendekatan yang penuh kehati-hatian dalam kebijakan luar negerinya. Berada di antara dua negara tetangga yang kuat dan memiliki kepentingan yang saling bersaing, Nepal secara historis berupaya mempertahankan kedaulatan dan otonomi nasionalnya dengan cara memupuk hubungan yang seimbang dengan kedua pihak (Gupta, 2023). Kehadiran MCC dan BRI semakin memperumit upaya penyeimbangan ini, karena kedua inisiatif tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Nepal. Penelitian ini akan menganalisis respons Nepal terhadap kedua inisiatif tersebut mencerminkan upaya sadar untuk melakukan *hedging*, yaitu melindungi diri dari risiko potensial dan memaksimalkan fleksibilitas strategisnya dalam lingkungan geopolitik yang dinamis.

Millennium Challenge Corporation (MCC) didirikan oleh Kongres AS pada bulan Januari 2004 dengan dukungan bipartisan yang kuat. MCC bermitra dengan negara-negara termiskin di dunia yang berkomitmen terhadap pemerintahan yang

adil dan demokratis, kebebasan ekonomi, dan investasi pada masyarakat mereka (Chand 2021, 62). MCC memberikan hibah berbatas waktu yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat institusi. Investasi pada infrastruktur inti dan reformasi kebijakan serta kelembagaan ini akan meningkatkan taraf hidup hampir 270 juta orang di 46 negara dan lima benua.

Ada beberapa alasan mengapa *Millennium Challenge Corporation* (MCC), selain karena lokasi geografisnya, keputusan ini sesuai dengan prinsip inti MCC. MCC memprioritaskan kemitraan dengan negara-negara yang menunjukkan komitmen terhadap praktik demokrasi, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi.

Nepal telah melakukan reformasi politik yang signifikan sejak transisinya menuju republik demokratis pada tahun 2008, menjadikannya kandidat yang lebih menarik untuk mendapatkan bantuan MCC dibandingkan dengan negara-negara dengan struktur pemerintahan yang lebih lemah. MCC berfokus pada negara-negara dengan rekam jejak yang terbukti dalam memanfaatkan bantuan secara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Shrestha, 2023). Nepal menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan, dengan sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan terbatasnya infrastruktur. Sumber daya MCC dapat dikerahkan secara strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya, *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan sebuah rencana ambisius yang dirancang oleh pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping pada tahun 2013. Inisiatif ini, yang juga dikenal sebagai *New Silk Road*,

bertujuan untuk menghubungkan wilayah pesisir Tiongkok dengan kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika (Maizland & Chatzky, 2023). Awalnya, BRI difokuskan untuk menghubungkan Asia Timur dengan Eropa, tetapi sejak tahun 2017, cakupannya diperluas hingga menjangkau negara-negara di Amerika Latin dan Afrika. Proyek ini secara luas dipandang sebagai bentuk peningkatan pengaruh Tiongkok di kawasan-kawasan tersebut (Jie & Wallace, 2021). BRI memiliki dua rute utama yang dirancang untuk menghubungkan dunia dengan Tiongkok melalui pembangunan infrastruktur fisik berskala besar. Yakni, *Silk Road Economic Belt* (SREB) dan *21st Centuries Maritime Silk Road* (MSR). Sayangnya karena letak geografis Nepal yang berada di antara daratan, tidak ada program MSR di Nepal.

Keterlibatan Nepal dalam Belt and Road Initiative (BRI) yang diusulkan Tiongkok dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan investasi, dan mendorong pembangunan infrastruktur nasional. Nepal menyadari bahwa posisi geografisnya yang strategis di antara India dan Tiongkok menjadikannya jalur potensial bagi perdagangan lintas kawasan, sekaligus membuka akses alternatif ke pasar global yang selama ini didominasi jalur maritim yang padat (Anupam 2024). Bagi Nepal, kerja sama dengan BRI merupakan kesempatan untuk mengurangi ketergantungan logistik pada India dan membangun infrastruktur transportasi lintas batas yang lebih efisien.

Selain itu, Nepal memahami bahwa Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi untuk menjadikan Nepal salah satu mitranya, khususnya dalam memanfaatkan potensi tenaga air yang sangat besar namun belum dikelola secara optimal. Nepal melihat inisiatif BRI sebagai peluang untuk menarik investasi dalam

pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air, yang tidak hanya dapat mendukung kebutuhan energi domestik, tetapi juga berpotensi diekspor ke negara-negara tetangga, termasuk Tiongkok. Di ranah ekonomi yang lebih luas, Nepal menilai bahwa proyek-proyek BRI dapat membuka ruang bagi investasi baru di berbagai sektor seperti infrastruktur, pariwisata, dan perdagangan, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Bagi Nepal, BRI bukan hanya sekadar proyek investasi, melainkan bagian dari upaya membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan regional dan memperluas jaringan kerja sama internasional (Bishwakarma 2018).

Kehadiran MCC di Nepal dipandang oleh sebagian orang sebagai strategi AS untuk melawan pengaruh regional Tiongkok yang semakin besar. BRI dapat dilihat sebagai cara bagi Tiongkok untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politiknya dengan Nepal, yang berpotensi menawarkan model pembangunan alternatif yang dapat memajukan visi Tiongkok untuk tatanan dunia multipolar dengan Nepal sebagai pusatnya (Bhattarai, 2019). Tujuan Tiongkok berinvestasi dalam bidang infrastruktur adalah untuk menempatkan dirinya sebagai mitra pembangunan yang dapat diandalkan di Nepal. Proyek BRI yang sukses dapat meningkatkan nilai hubungan diplomatik Tiongkok dengan negara di kawasan Asia Selatan dan memperkuat hubungannya dengan negara berkembang lainnya.

Dalam praktik pembentukan sebuah kebijakan di Nepal, kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan melalui interaksi antara cabang eksekutif (yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri), cabang legislatif (Parlemen Federal yang bertanggung jawab atas legislasi dan ratifikasi perjanjian), serta

partai-partai politik yang berkuasa maupun oposisi. Birokrasi juga memainkan peran penting dalam menyediakan keahlian teknis, sementara lembaga keamanan memiliki pengaruh dalam isu-isu sensitif seperti perbatasan (Proud and Karan 2025). Di luar struktur pemerintahan, masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan media massa juga sangat berpengaruh, seringkali memobilisasi opini publik yang dapat menekan pemerintah, seperti yang terlihat dalam perdebatan mengenai Millennium Challenge Corporation (MCC).

Secara umum, proses ini mengikuti siklus yang dimulai dengan penetapan agenda, di mana isu-isu penting diidentifikasi oleh berbagai pihak. Setelah itu, kementerian terkait akan merumuskan opsi-opsi kebijakan, seringkali dengan masukan dari para ahli. Kebijakan yang telah diformulasikan kemudian harus melalui tahap legitimasi atau adopsi, yang melibatkan persetujuan Dewan Menteri dan, untuk perjanjian internasional besar, ratifikasi oleh Parlemen. Setelah disetujui, kebijakan tersebut akan diimplementasikan oleh berbagai lembaga pemerintah, dan pada akhirnya dievaluasi untuk melihat efektivitasnya (Bhusal 2023, 260).

Studi ini akan menganalisis strategi *hedging* Nepal terhadap MCC dan BRI, dengan meneliti bagaimana tindakannya, seperti menegosiasikan persyaratan proyek, mendiversifikasi mitra dagang, dan menjaga saluran komunikasi terbuka dengan AS dan Tiongkok, selaras dengan prinsip inti teori *hedging* Gertsl. Dengan mengeksplorasi interaksi antara tekanan politik dalam negeri, keharusan ekonomi, dan realitas geopolitik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pilihan kebijakan luar negeri Nepal dan implikasinya terhadap pembangunan jangka panjangnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi *hedging* Nepal dalam menghadapi MCC dan BRI di kawasan Asia Selatan pada 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi *hedging* Nepal dalam menghadapi MCC dan BRI di wilayahnya dari tahun 2017 hingga 2024.
2. Untuk mengkaji komponen-komponen utama strategi *Hedging* Nepal dan implikasinya terhadap otonomi dan kepentingan nasionalnya.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus kepada analisis strategi kebijakan luar negeri Nepal dalam menghadapi persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Nepal, melalui kerangka teori *hedging*. Cakupan penelitian ini akan berfokus pada tahun 2017-2024, yang mana pada tahun 2017 AS dan Tiongkok melakukan perjanjian yang berbeda untuk membantu infrastruktur Nepal.

Fenomena yang terjadi di Nepal melalui perspektif *hedging* ini sangat berharga untuk mengeksplorasi bagaimana aktor-aktor dengan kapabilitas terbatas berupaya mempertahankan otonomi strategis dan memajukan kepentingan nasional mereka dalam sebuah sistem internasional yang didominasi oleh persaingan kekuatan besar. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Nepal menavigasi situasi tersebut dan mengamankan

kepentingannya. Dengan mengambil studi kasus MCC dan BRI, penelitian ini akan menganalisis apa saja komponen dan kriteria dari strategi *hedging* Nepal terhadap kedua negara tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yang juga akan menjadi pedoman dasar dari peneliti adalah *Analysing Nepal's Foreign Policy: A Hedging Perspective* karya Raunak Mainali. Artikel jurnal ini menganalisis kebijakan luar negeri Nepal melalui sudut pandang *hedging*, khususnya terkait dengan India dan Tiongkok. Artikel ini membahas bagaimana Nepal ketergantungan ekonominya pada India, karena lokasi geografis dan, mengadopsi strategi *hedging* untuk mengurangi potensial risiko. Artikel ini membahas bagaimana Nepal berupaya menyeimbangkan hubungannya dengan India dan Tiongkok untuk melindungi kedaulatannya dan mengurangi kerentanan ekonomi. Artikel ini juga mengkaji keterbatasan dan tantangan potensial dari strategi *hedging* ini dalam konteks persaingan Tiongkok-India (Mainali 2022). Artikel ini menyediakan kerangka teoritis tentang *hedging* oleh Jurgen Haacke dan menerapkannya pada konteks keberhasilannya. Di sisi lain, penelitian ini menerapkan kerangka teori *hedging* yang di konseptualisasikan oleh Alfred Grestl yang bisa menganalisis lebih dalam strategi yang dijalankan oleh Nepal.

Penelitian kedua yang akan memiliki topik serupa yakni tulisan dari Dr Mahesh Maskey yang berjudul *Nepal's Fight for Sovereignty, the Millennium Challenge Corporation, and the US's New Cold War against China*. Disini menjelaskan secara eksklusif pada *Millennium Challenge Corporation* (MCC) di

Nepal, yang membingkainya dalam konflik geopolitik yang lebih luas antara AS dan Tiongkok. Penelitian ini mengadopsi perspektif yang sangat kritis dan secara eksplisit bersifat geopolitik, dengan menyatakan bahwa MCC terutama merupakan instrumen strategi keamanan nasional AS dan bagian dari "Perang Dingin Baru" melawan Tiongkok, dengan implikasi bagi kedaulatan Nepal (Maskey 2024, 3).

Lalu pada tulisan ketiga ada tulisan dari Hari Chand yang berjudul *Nepal's Engagement in BRI and MCC: Implications on Nepal's Geopolitics and Foreign Policy*. Tulisan ini mendefinisikan BRI, MCC, dan perspektif *Heartland* di bawah teori geopolitik Mackinder secara singkat. Tulisan ini menganalisis secara kritis isu dan konsekuensi BRI dan MCC pada geopolitik dan kebijakan luar negeri Nepal. Ini meneliti BRI dan MCC di arena global secara singkat bagaimana mereka telah mendunia. Sementara itu, makalah ini menilai hubungan Strategi Indo-Pasifik (IPS) dan MCC. Selain itu, tulisan ini mengevaluasi secara kritis warisan kebijakan luar negeri Nepal dan implikasi MCC sesuai dengan Konstitusi Nepal-2015 (Chand 2021, 6). Tulisan ini berlandaskan teori geopolitik dan tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana Nepal menerapkan kebijakan luar negerinya.

Berdasarkan ketiga jurnal yang telah diuraikan, sudah banyak yang menganalisa kondisi geopolitik Nepal ketika perjanjian MCC dan BRI telah dilaksanakan hingga tahun 2024 dan juga ada yang membahas *hedging strategy*-nya Nepal terhadap Tiongkok dan India. Tetapi, dalam artikel jurnal yang ada pada tinjauan pustaka belum ada yang secara langsung menganalisa strategi *hedging* Nepal terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan lebih dalam terhadap strategi kebijakan yang dilakukan oleh Nepal.

1.6 Kerangka Pemikiran

Alfred Gerstl mengenalkan *re-conceptualisation of hedging* dalam bukunya yang berjudul “Hedging Strategies in Southeast Asia”. Di dalam buku tersebut menjelaskan dua pertanyaan utama yakni mengapa dan bagaimana sebuah negara melakukan *hedge*, dari kedua pertanyaan tersebut munculah lima komponen penting bagi sebuah negara melakukan hedge, antara lain:

1. Persepsi dari *hedger*:
 - a. *Perception of risk and opportunities related to the hedging target*, meneliti bagaimana negara yang melakukan hedge memandang ancaman (terhadap kedaulatan, integritas teritorial, ketergantungan ekonomi, dan pengambilan keputusan otonom) dan manfaat (peningkatan keamanan, pertukaran ekonomi, dan legitimasi rezim domestik) yang terkait dengan hubungan yang lebih dekat dengan kekuatan yang menjadi tujuan *hedging*.
 - b. *Perception of the strategic value of other great power and international organizations*, menyelidiki bagaimana negara yang melakukan *hedging* memandang utilitas dan pentingnya kekuatan besar dan organisasi internasional lainnya sebagai mitra potensial dalam strategi *hedging*.
2. *Political-diplomatic engagement*, Komponen ini menilai keadaan dan kualitas hubungan diplomatik dan politik dengan target *hedging* dan kekuatan signifikan lainnya. Hal ini diukur berdasarkan faktor-faktor seperti frekuensi kunjungan politik dan sejauh mana perjanjian yang sudah terjalin.

3. *Economic engagement*, berfokus pada bagaimana negara yang melakukan *hedging* bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari hubungannya dengan target *hedging* dan mitra utama lainnya. Indikatornya meliputi volume perdagangan, perjanjian perdagangan, investasi, pariwisata, dan pertukaran pelajar.
4. *Limited balancing*, melibatkan penerapan langkah-langkah penyeimbangan yang tidak mencapai "*hard balancing*" atau bisa diartikan sebagai aliansi militer yang formal. Hal ini meliputi:
 - a. *Internal balancing*: Memperkuat kemampuan ekonomi domestik dan swadaya militer.
 - b. *Soft balancing*: Memanfaatkan kemitraan bilateral dan multilateral nonmiliter dengan negara-negara dan organisasi internasional untuk membatasi tindakan negara adidaya.
5. *Limited Bandwagoning*, merujuk pada bentuk *bandwagoning* yang lebih lemah, negara yang melakukan *hedging* harus setuju untuk berkoordinasi pada isu-isu kebijakan tertentu dengan target *hedging*, tetapi dengan pemahaman bahwa pihak yang lebih kuat (target *hedging*) mungkin memperoleh lebih banyak manfaat. Negara yang melakukan *hedging* berusaha untuk menghindari hilangnya otonomi atau menjadi terlalu bergantung.

Hedging dipahami sebagai strategi berbeda yang melampaui pilihan tradisional untuk *balancing* atau *bandwagoning*. Strategi *hedging* melibatkan pengejaran yang bersamaan dari keterlibatan dan penahanan terhadap kekuatan hegemonik yang berpotensi. Ini berarti bahwa negara-negara yang mengadopsi

strategi *hedging* secara aktif mencari hubungan ekonomi yang lebih erat dan potensi manfaat dari kekuatan yang sedang bangkit (elemen *bandwagoning*), sementara secara bersamaan mempertahankan atau memperkuat hubungan keamanan dengan kekuatan lain (elemen *balancing*) untuk mengurangi potensi risiko dan memastikan otonomi strategis mereka (Gerstl 2022, 15).

Inovasi utama dalam kerangka Gerstl adalah penekanan signifikan pada persepsi negara yang melakukan *hedging*. Inovasi Gerstl termasuk bagaimana negara yang melakukan *hedging* (*hedger*) memandang risiko dan peluang yang disajikan oleh kekuatan hegemonik potensial di berbagai aspek seperti keamanan, ekonomi, dan politik dalam negeri. Meninjau lebih jauh, Alfred Gerstl mempertimbangkan penilaian negara yang melakukan *hedging* terhadap nilai strategis yang ditawarkan oleh mitra penyeimbang potensial. Ketika fokus pada persepsi ini, akan dapat menjelaskan mengapa suatu negara mungkin memilih untuk melakukan *hedging* sejak awal. Implementasi *hedging* yang sebenarnya melibatkan campuran keterlibatan politik-diplomatik, keterlibatan ekonomi dengan semua kekuatan besar, langkah-langkah *balancing* yang terbatas (*internal strengthening and soft balancing*), dan *bandwagoning* terbatas di area-area spesifik yang tidak kritis, semuanya ditujukan untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan ketergantungan dan menjaga fleksibilitas strategis (Gerstl 2022).

1.7 Argumen Sementara

Strategi *hedging* yang di konseptualisasikan oleh Alfred Gerstl menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami pendekatan Nepal terhadap MCC dan BRI. Nepal, negara kecil, menavigasi dinamika kompleks antara

AS (MCC) dan Tiongkok (BRI) dengan menggunakan *hedging strategy*. Hal ini melibatkan diversifikasi hubungan untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan manfaat. Hubungan Nepal dengan Tiongkok diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomi dan perdagangan melalui BRI. Masalah diplomasi *debt trap* muncul ketika negara peminjam gagal mengembalikan uang pinjaman dengan benar. *Hedging* dengan Tiongkok dan Amerika Serikat dapat bermanfaat bagi Nepal jika mengadopsi strategi investasi yang baik. Untuk menghindari diplomasi *debt trap* dari Amerika Serikat dan Tiongkok, uang pinjaman harus diinvestasikan dalam portofolio yang tepat. Nepal bertujuan untuk mempertahankan otonomi strategisnya. Komponen Gerstl, seperti *balancing engagement* dan *economic pragmatism*, terlihat jelas dalam tindakan balancing yang hati-hati di Nepal, yang memastikan tidak ada inisiatif yang merugikan kepentingan intinya (Gerstl 2022, 21).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi kasus**. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif Nepal dalam menghadapi rivalitas geopolitik AS-Tiongkok. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan untuk fokus pada satu kasus Nepal secara mendalam dan mendetail.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Nepal. Sementara itu, objek penelitiannya adalah pilihan kebijakan Pemerintahan Nepal dalam melakukan strategi *hedging*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri berbagai buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang mengenai topik tersebut. Situs-situs yang akan menjadi tempat mencari tulisan dan jurnal seperti jstor, Research Gate, Routledge, Taylor & Francis Group, lalu situs kumpulan artikel biasa yang terpercaya seperti bbc.com, kathmandupost.com, oboreurope.com, dan situs-situs resmi dari pemerintahan Nepal, serta dari situs resmi dari mcc.gov dan yidaiyilu.gov.cn.

Sementara tempat-tempat untuk mencari data secara luring adalah di perpustakaan sekitar wilayah kampus Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan-perpustakaan di wilayah Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari situs resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dari pemerintah dan Kementrian Luar Negeri Nepal. Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah data dikumpulkan, proses analisis dimulai dengan beberapa langkah. Pertama, data dikelola dan dipersiapkan untuk dianalisis. Kemudian, seluruh data dibaca dengan cermat untuk memahami maknanya secara menyeluruh. Hasil pemahaman ini dicatat atau direkam untuk referensi selanjutnya. Selanjutnya, data dibagi menjadi beberapa kategori yang sesuai untuk memudahkan penggabungan sub-sub tema atau sub-sub bab. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola dan hubungan antar data. Tahap berikutnya adalah

mendeskripsikan hasil penelitian secara detail dan akurat. Deskripsi ini harus objektif dan berdasarkan pada data yang telah dianalisis. Terakhir, interpretasi dilakukan terhadap hasil penelitian. Interpretasi ini berdasarkan dengan lima komponen utama yang dijelaskan oleh Alfred Gerstl terhadap rekonseptualisasi kerangka pemikiran *Hedging*. Proses analisis data ini dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan kualitas dan validitas penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan hal yang mengacu pada teori, konsep metode, dan hal-hal yang membantu proses penguraian penelitian pada bab selanjutnya.

Bab kedua dan ketiga akan memahami konteks dan menganalisis strategi *hedging* Nepal kepada *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dari Amerika Serikat dan *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok, yang akan dipahami melalui kerangka teori *hedging strategy* dari Alfred Grestl, yang memiliki lima komponen utama yakni *Perception of risk and opportunities*, *Political-diplomatic engagement*, *Economic engagement*, *Limited balancing*, dan *Limited Bandwagoning*.

Terakhir, bab keempat berisikan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Pada bab ini akan ditarik kesimpulan tentang bagaimana Nepal akhirnya bisa mengeksekusi strategi *hedging* terhadap kebijakannya pada Amerika Serikat dan Tiongkok.

BAB II

Strategi *Hedging* Nepal Terhadap Amerika Serikat

Bagian kedua dari penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana strategi *hedging* diterapkan oleh pemerintah Nepal terhadap Amerika Serikat melalui proyek inisiatif *Millennium Challenge Corporation* (MCC). Fenomena ini akan dianalisis menggunakan kerangka pemikiran dari Alfred Gerstl yang dijelaskan dalam bukunya tentang *hedging strategy* di Asia Tenggara yang memiliki lima komponen utama yakni *Perception of risk and opportunities*, *Political-diplomatic engagement*, *Economic engagement*, *Limited balancing*, dan *Limited Bandwagoning*.

Penelitian ini menerapkan lima komponen dari kerangka *hedging* Gerstl kepada kasus Nepal, mencakup persepsi risiko dan peluang, keterlibatan politik-diplomatik, keterlibatan ekonomi, *limited balancing*, dan *limited bandwagoning*. Penelitian ini akan membahas penanganan Nepal terhadap perjanjian MCC menunjukkan strategi *hedging* yang reaktif. Pendekatan ini dicirikan oleh keterlibatan oportunistik, manuver diplomatik yang hati-hati, dan respons kebijakan yang tidak konsisten yang dibentuk oleh kontestasi domestik dan kepekaannya terhadap kondisi geopolitik.

2.1 Persepsi Risiko dan Peluang

Dalam tatanan regional Indo-Pasifik yang semakin terpolarisasi, persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah meningkat, negara-negara kecil seperti Nepal menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menavigasi pilihan kebijakan luar negeri mereka. Terletak di antara dua raksasa geopolitik India

dan Tiongkok perilaku internasional Nepal secara tradisional menganut kebijakan strategi *hedge* dan netralitas yang hati-hati. Namun, kontroversi seputar perjanjian *Millennium Challenge Corporation* (MCC) Amerika Serikat di Nepal menggambarkan bagaimana negara dengan kekuatan kecil dipaksa untuk mengadopsi strategi diplomatik yang modern untuk mengelola risiko dan peluang dalam lingkungan geopolitik yang diperebutkan.

Pembuat kebijakan Nepal cenderung melihat Amerika Serikat sebagai mitra pembangunan penting yang menawarkan bantuan tanpa beban utang, khususnya melalui program seperti MCC. Mereka menghargai penekanan AS pada tata kelola yang baik, transparansi, dan nilai-nilai demokrasi. Dari sudut pandang ini, MCC adalah peluang besar untuk mendapatkan investasi infrastruktur yang vital, khususnya di sektor energi dan transportasi, yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi Nepal tanpa menambah beban utang negara. Adanya MCC juga dipandang sebagai cara untuk mendiversifikasi sumber bantuan dan menghindari ketergantungan berlebihan pada satu negara saja, yang secara strategis sangat berharga (Amatya 2020).

Namun, di sisi lain, ada juga persepsi mengenai risiko dan kekhawatiran terhadap AS. Isu utama adalah potensi klausul-klausul yang dianggap mengancam kedaulatan nasional atau keterlibatan Nepal dalam strategi geopolitik AS yang lebih luas, seperti Strategi Indo-Pasifik, yang seringkali dilihat sebagai upaya untuk membendung Tiongkok (Amatya 2020). Kekhawatiran ini seringkali memicu perdebatan politik internal yang intens dan protes publik, memaksa pembuat kebijakan untuk berhati-hati agar tidak 'memprovokasi' Tiongkok atau terlihat berpihak, yang dapat mengganggu keseimbangan hubungan luar negeri Nepal.

Inti dari strategi *hedging* adalah persepsi risiko dan peluang atas keterlibatan negara-negara besar. Bagi Nepal, perjanjian MCC menghadirkan peluang ekonomi yang signifikan dan risiko geopolitik yang besar. Melalui sudut pandang ekonomi, hibah MCC sebesar \$500 juta menjanjikan peningkatan penting pada infrastruktur transmisi energi dan jaringan jalan Nepal, mengatasi kekurangan infrastruktur yang sudah berlangsung lama yang telah menghambat pembangunan ekonomi negara tersebut (Maskey 2024, 6). Mengingat tantangan Nepal dalam menarik investasi asing berskala besar dan pemulihannya yang berkelanjutan dari gempa bumi tahun 2015, MCC awalnya dianggap oleh para pemimpin Nepal sebagai peluang penting untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

Nepal pertama kali memenuhi syarat untuk Program MCC pada tahun 2006 dengan memenuhi kriteria yang terkait dengan “*Control of Corruption*” dan “*Rule of Law*” (Millennium Challenge Corporation 2024). Setelah menyelesaikan rangkaian *threshold*, termasuk reformasi manajemen keuangan publik, Nepal memperoleh kelayakan untuk Perjanjian Lengkap. Negosiasi mencapai puncaknya dengan penandatanganan Perjanjian Lima Tahun senilai US\$500 juta pada tanggal 30 September 2017 di Kathmandu, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba (Maskey 2024, 5), dengan mandat untuk:

1. Meningkatkan 112 km koridor jalan strategis ke standar segala cuaca,
2. Membangun jaringan transmisi 400 kV yang menghubungkan Kohalpur (Nepal) dan New Delhi (India),
3. Memperkuat sektor kelistrikan Nepal melalui reformasi kebijakan dan kelembagaan.

Keterlibatan *Millennium Challenge Corporation* di Nepal telah

menghasilkan dividen nyata di seluruh infrastruktur, kapasitas institusional, dan peluang ekonomi. Dengan memberikan hibah sebesar US\$500 juta, ditambah dengan kontribusi awal Nepal yang bersejarah sebesar \$197 juta, MCC menargetkan untuk menuntaskan dua masalah yang paling mengikat bagi pertumbuhan Nepal: listrik yang tidak dapat diandalkan dan biaya jalan tol yang mahal dan tidak dapat diandalkan. Sejak awal, program ini dirancang tidak hanya untuk membangun beton dan kabel, tetapi juga untuk memberi solusi yang sistemik dalam pemberian layanan, kepercayaan sektor swasta, dan perdagangan lintas batas yang mendukung pengentasan kemiskinan berkelanjutan dan kemakmuran bersama (*Millennium Challenge Corporation, 2024*).

Di bidang kelistrikan, perjanjian MCC membiayai pembangunan jaringan transmisi 400 kV sepanjang 318 km antara Nepal dan India, yang menjembatani Kohalpur ke New Delhi dan tiga gardu induk berkapasitas tinggi. Investasi ini telah meningkatkan ketersediaan dan keandalan listrik secara signifikan: klinik pedesaan kini memelihara peralatan medis penting tanpa gangguan, rumah tangga menikmati penerangan hingga malam hari, dan jaringan listrik dapat menyerap sebagian besar potensi tenaga air Nepal yang besar (*Millennium Challenge Corporation, 2024*). Laporan pemantauan awal dari Agustus 2024 mencatat penurunan signifikan dalam jam pemadaman listrik di seluruh distrik proyek, yang memungkinkan perusahaan kecil beroperasi lebih konsisten dan siswa belajar di bawah penerangan listrik—peningkatan yang menjanjikan dividen pendidikan dan kesehatan jangka panjang (Silwal 2024).

Dalam proyek pembangunan jalan raya, Proyek Pemeliharaan Jalan MCC mengubah lebih dari 300 km jalan raya timur-barat yang penting dan meningkatkan

bagian koridor *Mid-Hill* antara Charali dan Butwal. Dengan melakukan kontrak *performance-based maintenance* dan melengkapi *Department of Roads* dengan sistem manajemen aset, waktu tempuh telah turun hingga 50 persen pada segmen yang dirawat, biaya transportasi telah menurun, dan akses pasar bagi produsen pertanian telah berkembang secara dramatis (*Millennium Challenge Corporation*, 2024). Keuntungan ini tidak hanya memperlancar pergerakan barang dan orang, tetapi juga telah meletakkan dasar bagi perusahaan logistik swasta untuk berinvestasi, dengan mengetahui bahwa koridor-koridor utama akan tetap dapat dilalui bahkan selama musim dingin.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, Perjanjian *Millennium Challenge Corporation* (MCC) telah secara signifikan memperkuat kebijakan dan kerangka kelembagaan di Nepal. Melalui program ambang batas (*threshold program*) yang mendahului perjanjian MCC, Nepal berhasil mengimplementasikan reformasi pengelolaan keuangan publik yang ketat. Upaya ini membangun kredibilitas yang esensial untuk penyusunan perjanjian secara komprehensif. Selama fase implementasi, MCC menyediakan bantuan teknis kepada Otoritas Listrik Nepal dan Departemen Jalan Raya, memperkenalkan praktik terbaik internasional dalam aspek pengadaan, perlindungan lingkungan dan sosial, serta keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif terhadap *gender* (Silwal 2024). Reformasi ini berkontribusi pada peningkatan transparansi, pengurangan keterlambatan kontrak, dan pembekalan lembaga-lembaga Nepal dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola proyek-proyek masa depan secara mandiri.

Selanjutnya, dengan memfasilitasi perdagangan listrik lintas batas yang andal dengan India, perjanjian ini telah membuka aliran pendapatan ekspor baru

bagi sektor tenaga air Nepal yang berkembang pesat (Chong 2023, 360). Proyeksi awal menunjukkan bahwa peningkatan ekspor listrik berpotensi menyumbang ratusan juta dolar setiap tahun bagi neraca pembayaran Nepal, menyediakan penyangga terhadap guncangan fiskal, dan menarik investasi swasta pada proyek-proyek pembangkitan hulu. Persetujuan Dewan MCC atas tambahan dana sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat pada Januari 2025 semakin menggarisbawahi keberhasilan awal program dan potensinya untuk memperkuat siklus pertumbuhan yang didorong oleh infrastruktur dan penguatan kelembagaan. Singkatnya, kesepakatan MCC bukan sekadar mekanisme pendanaan, melainkan telah menjadi platform untuk perubahan transformatif (Chong 2023, 362). Dengan memadukan pembiayaan berbasis hibah dengan metrik kinerja yang ketat, kemitraan pengembangan kapasitas, dan penekanan strategis pada hubungan lintas batas, MCC telah membantu Nepal mengatasi hambatan pembangunan yang krusial. Seiring dengan penyelesaian komponen jalan dan listrik, peningkatan ini diharapkan akan terus mengkatalisasi dinamisme ekonomi, memperdalam integrasi regional, dan memperkuat ketahanan jangka panjang Nepal.

Namun, MCC juga menimbulkan risiko yang signifikan. Di dalam negeri, segmen elit politik dan masyarakat sipil Nepal memandang perjanjian tersebut dengan curiga, karena khawatir hal itu merupakan perpanjangan strategis dari Strategi Indo-Pasifik AS, kerangka kerja yang secara luas dipahami dirancang untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan tersebut (Adhikari 2022, 470). Kecurigaan ini dipicu oleh kampanye misinformasi, oportunisme politik, dan protes publik yang membingkai MCC sebagai potensi pelanggaran kedaulatan Nepal. Persepsi risiko semakin diperburuk oleh intervensi

diplomasi Beijing yang tegas, dengan pejabat Tiongkok secara eksplisit memperingatkan bahwa MCC dapat mengganggu hubungan Nepal-Tiongkok dan membahayakan otonomi Nepal.

Dualitas persepsi ini mencerminkan ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara yang dianalisis oleh Gerstl. Seperti yang dicatat Gerstl, strategi *hedging* sering muncul dalam konteks negara-negara yang merasakan manfaat dari keterlibatan ekonomi dengan satu kekuatan sementara secara bersamaan mengakui risiko yang ditimbulkan oleh ketergantungan yang berlebihan atau keselarasan dengan aktor tersebut (Gerstl 2022, 22–23). Dalam kasus Nepal, MCC menghadirkan manfaat pembangunan langsung tetapi membawa konsekuensi geopolitik yang memerlukan navigasi yang cermat.

2.2 Keterlibatan dalam Politik dan Diplomasi

Komponen pertama dalam bagaimana strategi *hedging* dilakukan adalah keterlibatan politik-diplomasi yang bernuansa dengan berbagai faktor eksternal. Gerstl menekankan bahwa keterlibatan tersebut melibatkan pemeliharaan hubungan yang kuat dengan kekuatan yang bersaing sambil menghindari penyelarasan yang nyata, sehingga menjaga otonomi strategis (Gerstl 2022, 19–20). Penanganan diplomasi Nepal terhadap kontroversi MCC merupakan contoh pendekatan ini.

Sepanjang perdebatan MCC, pemerintah Nepal berturut-turut secara terbuka menegaskan bahwa perjanjian tersebut murni merupakan inisiatif pembangunan, tanpa dimensi militer atau strategis. Posisi ini ditegaskan kembali dalam perdebatan parlemen, pernyataan resmi, dan keterlibatan diplomasi dengan Washington dan Beijing (Shekhawat 2025). Para pemimpin Nepal, termasuk

Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Sher Bahadur Deuba, berusaha meyakinkan Tiongkok melalui pertukaran tingkat tinggi dan penegasan publik tentang kebijakan luar negeri Nepal yang tidak berpihak. Pada saat yang sama, Nepal mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat, terlibat dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengatasi kekhawatiran tentang ketentuan-ketentuan perjanjian dan mengklarifikasi keselarasannya dengan prinsip-prinsip konstitusional Nepal.

Dinamika domestik antara oposisi dan pemerintah di Nepal seringkali dicirikan oleh fragmentasi politik dan polarisasi yang tinggi, terutama pada isu-isu sensitif terkait kebijakan luar negeri dan bantuan asing. Nepal memiliki sistem multipartai dengan sejarah koalisi pemerintahan yang sering berganti, yang berarti konsensus politik seringkali sulit dicapai (Shekhawat 2025). Ketika ada tawaran besar seperti MCC atau BRI, partai-partai politik seringkali terpecah pandangannya. Partai oposisi, dan bahkan faksi-faksi di dalam partai yang berkuasa, akan menggunakan isu-isu ini sebagai platform untuk mengkritik pemerintah. Mereka membingkai proyek-proyek tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional, atau sebagai upaya kekuatan asing untuk memengaruhi urusan dalam negeri Nepal. Ini menciptakan perdebatan publik yang intens dan seringkali disertai protes jalanan.

Sentimen nasionalisme yang kuat di Nepal sering dimainkan oleh berbagai pihak politik. Jika suatu inisiatif asing dianggap merugikan kedaulatan atau kepentingan nasional, oposisi akan dengan cepat memanfaatkannya untuk menekan pemerintah, membuat pemerintah harus sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya (Shekhawat 2025). Sentimen dari pihak-pihak politik tersebut

mengakibatkan penundaan tiga tahun dalam meratifikasi perjanjian MCC. Hal ini mencerminkan sikap reaktif pemerintah saat berupaya mengelola oposisi domestik dan tekanan eksternal tanpa berkomitmen pada orientasi geopolitik tunggal. Pola keterlibatan politik yang hati-hati dan serba bisa ini sangat mencerminkan perilaku *reactive hedging* yang dikaitkan Gerstl dengan Filipina di bawah Rodrigo Duterte (Gerstl 2022, 72–73).

2.3 Keterlibatan dalam Ekonomi

Bagian ini merupakan landasan strategi *hedging*, yang memungkinkan negara-negara untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi mereka sambil menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu patron. Sejalan dengan pengamatan Gerstl, strategi keterlibatan ekonomi Nepal mencerminkan pragmatisme *omnidirectional*, sebagaimana dibuktikan oleh penerimaan hibah MCC secara bersamaan dan partisipasi berkelanjutan dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok (Gerstl 2022, 36). Keterlibatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) di Nepal telah menghasilkan dividen nyata di seluruh infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan peluang ekonomi. Dengan memberikan hibah sebesar US\$500 juta, ditambah dengan kontribusi awal Nepal yang bersejarah sebesar \$197 juta, MCC menargetkan dua kendala paling mengikat bagi pertumbuhan Nepal: listrik yang tidak dapat diandalkan dan jalan yang mahal dan tidak dapat diandalkan. Sejak awal, program ini dirancang tidak hanya untuk membangun beton dan kabel, tetapi juga untuk mengkatalisis peningkatan sistemik dalam pemberian layanan, kepercayaan sektor swasta, dan perdagangan lintas batas

yang mendukung pengentasan kemiskinan berkelanjutan dan kemakmuran bersama (The Minister of Finance of The Federal Democratic Republic of Nepal 2017, Lampiran II-2).

Tabel 1. Rangkuman rancangan anggaran MCC dengan Kementerian Keuangan Nepal.

(US\$)							
Component	CDF	Year 1 (2017)	Year 2 (2018)	Year 3 (2019)	Year 4 (2020)	Year 5 (2021)	Total
1. Electricity Transmission Project							
(a) Transmission Lines Activity	\$2,489,000	\$55,677,000	\$41,235,000	\$41,235,000	\$55,320,000	\$32,291,000	\$228,247,000
(b) Substation Activity	\$2,050,000	\$19,712,000	\$22,122,000	\$22,122,000	\$30,121,000	\$17,895,000	\$114,022,000
(c) Power Sector Technical Assistance Activity	\$435,000	\$6,398,000	\$4,054,000	\$2,886,000	\$4,331,000	\$4,301,000	\$22,405,000
(d) Program Management and Technical Oversight Activity	\$17,375,000	\$4,115,000	\$3,207,000	\$3,207,000	\$4,207,000	\$1,448,000	\$33,559,000
Subtotal	\$22,349,000	\$85,902,000	\$70,618,000	\$69,450,000	\$93,979,000	\$55,935,000	\$398,233,000
2. Road Maintenance Project							
(a) Technical Assistance Activity	\$2,632,000	\$1,843,000	\$1,227,000	\$1,142,000	\$165,000	\$36,000	\$7,045,000
(b) Strategic Road Maintenance Works Activity	\$3,520,000	\$1,033,000	\$11,645,000	\$16,011,000	\$13,031,000	---	\$45,240,000
Subtotal	\$6,152,000	\$2,876,000	\$12,872,000	\$17,153,000	\$13,196,000	\$36,000	\$52,285,000
3. Monitoring and Evaluation							
M&E Component Activities	\$198,000	\$732,000	\$1,977,000	\$1,898,000	\$1,355,000	\$3,332,000	\$9,492,000
4. Program Management and Administration							
(a) MCA-Nepal Program Administration	\$9,281,000	\$2,480,000	\$2,550,000	\$2,020,000	\$2,553,000	\$4,466,000	\$23,350,000
(b) Procurement, Fiscal, and Audit	\$2,520,000	\$4,110,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$3,080,000	\$16,640,000

Services							
Subtotal	\$11,801,000	\$6,590,000	\$4,860,000	\$4,330,000	\$4,863,000	\$7,546,000	\$39,990,000
MCC INVESTMENT	\$40,500,000	\$96,100,000	\$90,327,000	\$92,831,000	\$113,393,000	\$66,849,000	\$500,000,000
GOVERNMENT CONTRIBUTION	\$40,000,000	\$90,000,000					\$130,000,000
GRAND TOTAL	\$80,500,000						\$630,000,000

Sumber: Millennium Challenge Compact antara AS dengan Nepal

2017, Lampiran II-2.

Di sektor pembangunan jalan, proyek pemeliharaan jalan MCC mengubah lebih dari 300 km jalan raya timur-barat yang penting dan meningkatkan bagian koridor *Mid-Hill* antara Charali dan Butwal. Dengan melembagakan kontrak pemeliharaan berbasis kinerja dan melengkapi Departemen Jalan dengan sistem manajemen aset modern, waktu tempuh telah turun hingga 50 persen pada segmen yang dirawat, biaya transportasi telah menurun, dan akses pasar bagi produsen pertanian telah berkembang secara dramatis (The Minister of Finance of The Federal Democratic Republic of Nepal 2017, Lampiran III-15) Keuntungan ini tidak hanya memperlancar pergerakan barang dan orang tetapi juga telah meletakkan dasar bagi perusahaan logistik swasta untuk berinvestasi, mengetahui bahwa koridor utama akan tetap dapat dilalui bahkan selama musim hujan (Silwal 2024).

Sementara MCC menjanjikan investasi substansial dalam infrastruktur energi dan jaringan jalan Nepal, proyek-proyek yang didanai Tiongkok berjalan bersamaan, khususnya di sektor tenaga air dan transportasi (Adhikari 2022, 476–477). Pejabat dan pembuat kebijakan Nepal secara konsisten membingkai inisiatif-

inisiatif ini sebagai pelengkap daripada persaingan, yang menekankan tujuan pembangunan dan manfaat ekonomi bersama mereka. Pendekatan jalur ganda ini sejajar dengan perilaku Malaysia dan Vietnam sebagaimana didokumentasikan oleh Gerstl, para pemimpin secara aktif memanfaatkan peluang ekonomi dari berbagai aktor eksternal sambil secara hati-hati mengelola retorika diplomatik mereka untuk menghindari provokasi salah satu pihak (Gerstl 2022, 57–58; 101–102).

2.4 Limited Balancing

Meskipun negara-negara kecil seperti Nepal memiliki kapasitas terbatas untuk melakukan *balancing* terhadap militer secara terbuka, mereka dapat terlibat dalam kemitraan keamanan simbolis atau kerja sama pertahanan dengan negara-negara besar yang bersaing untuk mempertahankan opsi strategis dan pengaruh diplomatik. Gerstl menyoroti dimensi *hedging* ini sebagai mekanisme bagi negara-negara kecil untuk mengurangi kerentanan sambil menghindari aliansi militer formal (Gerstl 2022, 38).

Millennium Challenge Compact dari *Millennium Challenge Corporation* memicu perdebatan sengit terutama di sekitar *Section 7.1*, yang menetapkan bahwa "*this Compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.*" Para kritikus menganggap klausul ini sebagai lambang pelanggaran hukum, dengan alasan bahwa hal itu secara efektif mengangkat perjanjian hibah asing di atas undang-undang Nepal sendiri dan meskipun tidak secara eksplisit, konstitusinya melemahkan supremasi hukum nasional dan pengawasan dan keseimbangan yang dijamin berdasarkan Konstitusi 2015 (Rana 2021). Bahasanya diambil dari ketentuan hukum internasional standar yang memberikan keutamaan pada

perjanjian, tetapi frasa yang lugas dalam *Millennium Challenge Compact* (tidak adanya referensi yang lebih jelas ke hierarki hukum yang ada) meninggalkan ruang yang luas untuk salah tafsir publik dan eksploitasi politik. Rumor beredar bahwa MCC dapat mengesampingkan jaminan konstitusional, memberikan kekebalan kepada personel AS dari pengadilan Nepal (berdasarkan Pasal 6.8), dan bahkan mengizinkan penghentian Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tiga puluh hari yang selanjutnya memicu persepsi adanya asimetri dalam kewajiban hukum (Basnet 2021).

Selain dari *Section 7.1* dalam *Millennium Challenge Compact*, jangkauan hukum yang dianggap berlebihan meluas ke beberapa ketentuan tambahan yang dianggap tidak jelas atau berat sebelah oleh para kritikus. *Section 6.8* dari *Millennium Challenge Compact* memberikan kekebalan hukum kepada staf dari MCC di semua pengadilan dan tribunal di Nepal. Meskipun ini adalah pengecualian diplomatik yang umum, dalam konteks lokal Nepal, ketentuan ini justru memicu kekhawatiran serius. Banyak pihak khawatir bahwa agen asing (MCC) dapat beroperasi tanpa akuntabilitas di wilayah Nepal, seperti yang diungkapkan oleh Amatya (2020).

Selain itu, Klausul Bagian 5 yang mengizinkan salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian tanpa alasan dengan pemberitahuan tertulis 30 hari juga menambah kekhawatiran. Ketentuan ini menimbulkan ketakutan akan penarikan mendadak dana penting untuk proyek infrastruktur, serta potensi kewajiban finansial yang harus ditanggung Nepal berdasarkan Bagian 5.2 jika proyek tersebut dihentikan (Amatya 2020).

Secara keseluruhan, bagi para penentang Perjanjian MCC, ketentuan-ketentuan ini secara kolektif dianggap melanggar hak prerogatif kedaulatan Nepal. Dampak dari anggapan pelanggaran hukum ini beragam. Di dalam negeri, ketakutan akan erosi kedaulatan memicu protes jalanan berskala besar di Kathmandu, Pokhara, dan sekitarnya, dengan partai-partai politik mulai dari Partai Komunis Bersatu (काकाकाका - *Ekikrta Maois*) hingga Partai Kongres Nepal (काकाकाका काकाकाकाकाका - *Nepaali Kangres*) menganggap perjanjian tersebut sebagai ancaman eksistensial terhadap otonomi Nepal (Anupam 2024; Basnet 2021). Ratifikasi parlemen terhenti selama lebih dari empat tahun, menunda proyek-proyek jalan raya dan transmisi listrik yang penting dan memperburuk kemacetan infrastruktur. Selain itu, kontroversi tersebut membuat hubungan Nepal-AS tegang. hubungan diplomatik, yang memaksa interupsi yang berulang kali dilakukan oleh pimpinan MCC dan Kedutaan Besar AS untuk menghilangkan disinformasi, upaya yang dengan sendirinya menggarisbawahi rapuhnya kepercayaan publik dalam kerja sama internasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintahan Nepal mengadopsi kombinasi langkah-langkah hukum, politik, dan komunikasi. Pertama, pada bulan Februari 2022, parlemen meratifikasi *Millenium Challenge Compact* bersamaan dengan *12-point Interpretative Declaration* yang mengklarifikasi bahwa tidak ada ketentuan MCC yang menggantikan konstitusi dan bahwa setiap perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama berdasarkan hukum internasional (Subedi 2021; Rana 2021). Kedua, Kementerian Hukum, Kehakiman, dan Urusan Parlemen Nepal melakukan tinjauan terperinci yang mengonfirmasi bahwa berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Nepal, perjanjian

internasional yang diratifikasi secara resmi secara inheren lebih diutamakan daripada undang-undang domestik yang saling bertentangan, tetapi tidak pernah lebih diutamakan daripada Konstitusi itu sendiri (Subedi 2021). Ketiga, upaya berkelanjutan oleh Cameron Alford (mantan Wakil Presiden MCC) dan para diplomat AS, termasuk seminar publik dan pelibatan media, berupaya untuk menghilangkan mitos tentang pangkalan militer atau pembayaran paksa, dengan menekankan sifat bantuan yang berbasis hibah dan berorientasi pada kinerja. Terakhir, pemerintah mengintegrasikan perlindungan legislatif dalam perjanjian mendatang dengan menekankan bahasa yang lebih jelas seputar kekebalan, penghentian, dan penyelesaian sengketa untuk mencegah ambiguitas serupa menghambat kemitraan infrastruktur penting. Secara kolektif, langkah-langkah ini telah mulai membangun kembali kepercayaan pada perjanjian, membuka jalan bagi dimulainya kembali proyek jalan dan listrik yang terhenti sambil menjaga integritas kedaulatan Nepal.

Dalam kasus Nepal, *limited balancing* tersebut terwujud dalam kerja sama keamanan yang berkelanjutan, meskipun sederhana, dengan Amerika Serikat, terutama di bidang-bidang seperti pelatihan penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan latihan penanggulangan bencana (Shekhawat 2025). Meskipun kegiatan-kegiatan ini tidak secara eksplisit ditujukan terhadap Tiongkok, kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi sebagai instrumen penyeimbangan yang halus, yang menandakan kesediaan Nepal untuk mempertahankan hubungan keamanan yang beragam tanpa secara terang-terangan berpihak pada satu kekuatan.

Pendekatan ini menyerupai perilaku penyeimbangan terbatas yang diamati di Filipina di bawah Duterte, pemerintahan Filipina harus mempertahankan kerja

sama pertahanan dengan Amerika Serikat bahkan ketika negara itu mengejar keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok (Gerstl 2022, 80–81). Dalam kedua kasus, tujuan strategisnya adalah untuk menjaga otonomi dan fleksibilitas dengan mempertahankan akses ke kemitraan keamanan alternatif.

2.5 *Limited Bandwagoning*

Komponen dari *hedging strategy* adalah *avoidance of one-sided* atau *bandwagoning*. Meskipun terlibat dalam ekonomi dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, Nepal dengan hati-hati menahan diri untuk tidak sepenuhnya selaras dengan agenda geopolitik yang lebih luas dari kedua kekuatan tersebut. Seperti yang diamati Gerstl, *hedging strategy* yang berhasil melibatkan keterlibatan ekonomi tanpa menundukkan otonomi kebijakan luar negeri dan keamanan suatu negara (Gerstl 2022, 41). Partisipasi Nepal secara bersamaan dalam kerangka kerja BRI dan MCC menggambarkan prinsip ini. Sepanjang kontroversi MCC, para pemimpin Nepal secara konsisten menolak karakterisasi perjanjian tersebut sebagai bagian dari Strategi Indo-Pasifik AS, dan malah membingkainya sebagai inisiatif pembangunan yang tidak berpihak (Adhikari 2022, 478–479). Demikian pula, meskipun menyambut investasi Tiongkok di bawah BRI, Nepal menghindari dukungan terhadap narasi strategis atau kebijakan keamanan Beijing di Asia Selatan. Pemeliharaan otonomi kebijakan yang disengaja ini mencerminkan perilaku *limited bandwagoning* yang dikaitkan Gerstl dengan ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara (Gerstl 2022, 42–43). Seperti para aktor ini, Nepal memanfaatkan ambiguitas strategisnya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi sambil meminimalkan komitmen keamanan dan keterlibatan geopolitik.

Tabel 1. Komponen dan kriteria *hedging* Nepal kepada Amerika Serikat

Komponen	Kriteria
<i>Why does Nepal hedge?</i>	
<i>Nepal's perception of risk and opportunities related to USA</i>	<p>Risk: Keamanan: Takut memprovokasi Tiongkok, membahayakan hubungan keamanan dan stabilitas perbatasan.</p> <p>Ekonomi: Risiko membahayakan investasi dan bantuan Tiongkok di bawah BRI.</p> <p>Politik Dalam Negeri: Persaingan internal yang intens, protes, narasi oposisi yang membingkai MCC sebagai neokolonial, mengancam kedaulatan nasional.</p>
<i>Perception of the strategic value of other great powers and international organizations</i>	<p>Opportunities: Pembangunan Ekonomi: Hibah infrastruktur senilai \$500 juta untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur listrik dan jalan.</p> <p>Otonomi Strategis: Diversifikasi keterlibatan negara adikuasa; hindari ketergantungan yang berlebihan.</p> <p><i>Diplomatic Leverage:</i> menggunakan penerimaan MCC untuk mengisyaratkan keterbukaan terhadap negara barat sambil menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok.</p>
<i>How does Nepal hedge?</i>	
<i>Politic-diplomatic engagement</i>	<p><i>Depth of political-diplomatic relations</i> Pemeliharaan hubungan politik dan kepastian diplomatik terhadap berbagai kekuatan besar.</p> <p>Menegaskan MCC sebagai pembangunan; meyakinkan Tiongkok mengenai ketidakberpihakan Nepal dan komitmen BRI; memperpanjang ratifikasi untuk manuver diplomatik.</p>

<i>Economic engagement</i>	<p><i>Depth of economic relations</i> Menerima hibah MCC sambil melanjutkan proyek BRI; membingkai inisiatif sebagai pelengkap; menjaga fleksibilitas ekonomi.</p>
<i>Limited balancing</i>	<p><i>Status of security relations</i> Mempertahankan kerja sama militer/keamanan sederhana dengan kekuatan eksternal untuk pilihan strategis.</p> <p><i>Pelatihan penjagaan perdamaian, latihan tanggap bencana, kerja sama keamanan kecil dengan AS; tidak ada dimensi militer bagi MCC; menghindari penyelarasan formal.</i></p>
<i>Limited bandwagoning</i>	<p><i>Status of security relations cooperation (security and related political agreements with hedging target)</i> Menghindari keberpihakan sepihak; mempertahankan otonomi kebijakan dalam masalah strategis.</p> <p>Menolak MCC sebagai bagian dari Strategi Indo-Pasifik AS; mempertahankan non-keberpihakan; menghindari subordinasi keamanan/kebijakan luar negeri ke Tiongkok atau AS.</p>

Sumber: Data diolah penulis, mengadopsi Alfred Gerstl 2022.

BAB III

Strategi *Hedging* Nepal Terhadap Tiongkok

Pada bab ketiga ini membahas bagaimana Nepal dalam menghadapi *Belt and Road Initiative* (BRI) menggunakan kerangka teori *hedging strategy* dari Alfred Gerstl, metode analisis yang sama dengan bab sebelumnya. Keterlibatan kebijakan luar negeri Nepal dengan BRI Tiongkok dan MCC AS memberikan gambaran yang meyakinkan tentang *hedging strategy* milik Alfred Gerstl dalam praktiknya. Negara tersebut dengan cepat menggabungkan unsur-unsur kerja sama ekonomi (*bandwagoning*) dengan langkah-langkah untuk mengurangi risiko (*balancing*), sehingga menjaga kepentingan nasionalnya di tengah persaingan kekuatan besar. Nepal secara aktif terlibat secara ekonomi dengan Tiongkok melalui BRI dan Amerika Serikat melalui MCC. Bersama Tiongkok, hal ini melibatkan upaya pengembangan infrastruktur, peningkatan perdagangan, dan peningkatan konektivitas. Dengan AS, hal ini memerlukan penerimaan hibah yang substansial untuk infrastruktur dan reformasi ekonomi. Keterlibatan ganda ini mencerminkan upaya pragmatis Nepal untuk pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terlepas dari sumber bantuannya.

3.1 Persepsi Risiko dan Peluang

Nepal bergabung dengan BRI pada tahun 2017 dan menyelesaikan perjanjian kerangka kerja yang telah lama tertunda pada akhir tahun 2024 mencerminkan upaya Nepal untuk memanfaatkan pendanaan infrastruktur Tiongkok sambil menghindari ketergantungan yang berlebihan pada India. Meskipun Nepal menandatangani *MoU* awal dengan BRI pada bulan Mei 2017,

implementasi substantif terbengkalai selama tujuh tahun di tengah perselisihan modalitas proyek dan persyaratan utang. Pada bulan Desember 2024 Kementerian Luar Negeri Nepal mengumumkan perjanjian kerangka kerja yang telah lama ditunggu-tunggu, yang ditandatangani selama kunjungan resmi Perdana Menteri K.P. Sharma Oli ke Beijing (Bhole 2025). Kesepakatan ini baru terjalin dalam hal menggerakkan studi kelayakan dan rangkaian proyek yang terhenti sejak awal perjanjian.

Tiongkok dipandang oleh pembuat kebijakan Nepal sebagai tetangga besar yang menawarkan peluang transformatif dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas. *Belt and Road Initiatives* (BRI) Tiongkok dilihat sebagai jalur potensial untuk mengatasi isolasi geografis Nepal sebagai negara terkurung daratan, membuka akses ke pasar Tiongkok yang luas, dan memfasilitasi perdagangan lintas batas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemampuan Tiongkok untuk melakukan investasi berskala besar dan proyek infrastruktur dengan cepat sangat menarik bagi Nepal yang memiliki kebutuhan pembangunan mendesak (Gupta 2023).

Meskipun demikian, ada kekhawatiran yang signifikan terkait dengan Tiongkok dan BRI. Risiko “*debt trap diplomacy*” adalah hal utama yang menjadi perhatian serius, di mana pembuat kebijakan berusaha menghindari skenario di mana Nepal terlalu banyak meminjam dan berpotensi kehilangan kontrol atas aset-aset strategisnya. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek besar, serta kritik domestik yang dapat muncul jika proyek-proyek tersebut tidak transparan atau tidak menguntungkan secara adil bagi rakyat Nepal (Gupta 2023). Pembuat kebijakan Nepal sadar bahwa hubungan yang

terlalu dekat dengan Tiongkok, terutama dengan investasi yang tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan ketergantungan asimetris.

Dalam perjanjian yang terjadi terdapat dua proyek utama yang akan dijalankan di Nepal, yakni pembangunan bandara internasional Pokhara dan jalan raya di pegunungan Himalaya yang membentang dari Tibet hingga Kathmandu. Nepal didanai melalui *concessional loan* senilai US\$216 juta, proyek bandara internasional Pokhara dibuka pada tahun 2023 namun menghadapi pengelolaan yang kurang dan tuduhan perubahan nama menjadi proyek BRI meskipun tidak memperoleh persetujuan awal dari BRI (Dhakal 2025). Keraguan dari BRI tersebut muncul ketika warga lokal Pokhara mengadakan demo kepada intervensi perusahaan Tiongkok yang hadir di kotanya, dipimpin oleh anggota pusat *rashtriya aikt abhiyan* (rashtriya aikt abhiyan) Ishwar Lama, protes tersebut dihadiri oleh sekelompok penduduk setempat yang meneriakkan slogan-slogan seperti ‘bebaskan bandara Pokhara dari jeratan utang;’ ‘operasikan bandara sepenuhnya;’ ‘lindungi kemerdekaan nasional;’ dan ‘ubah pinjaman BRI menjadi hibah’ (EPARDAFAS 2024). Para demonstran mengungkapkan kekhawatiran bahwa proyek BRI, yang sering dianggap sebagai simbol bantuan keuangan Tiongkok, dapat berubah menjadi beban utang bagi negara. Banyak isu yang beredar bahwa adanya motif tersembunyi dari Tiongkok, termasuk potensi pengerahan tentara Tiongkok di Pokhara, Klaim dari Ishwar Lama ini menambahkan dimensi baru pada perdebatan yang sedang berlangsung seputar proyek BRI di Nepal.

Keterlibatan Nepal dengan Tiongkok untuk peluang ekonomi melalui BRI, sementara secara aktif menolak pinjaman, dan penerimaan hibah AS melalui MCC,

ditambah dengan perlindungan ketat terhadap kedaulatannya terhadap kondisi politik yang dipersepsikan, merupakan contoh strategi yang berlapis-lapis dan adaptif. Sifat berbeda dari risiko yang dipersepsikan dari Tiongkok (*debt/economy trap*) dan AS (*political/sovereignty erosion*) memerlukan taktik *balancing* yang berbeda (Mainali 2022, 7). Bagi Tiongkok, pendekatannya adalah kehati-hatian finansial, sedangkan bagi AS, pendekatannya melibatkan ketegasan hukum dan politik. Hal ini menyoroti bahwa *hedging* Gerstl bukanlah strategi yang seragam melainkan pendekatan yang bernuansa luas dan fleksibel. *Hedging* Nepal berlapis-lapis, menerapkan mekanisme penyeimbangan tertentu, seperti kondisi keuangan, deklarasi hukum, dan ketidakberpihakan keamanan, untuk mengatasi ancaman tertentu yang dipersepsikan dari berbagai kekuatan besar, sementara tetap mengejar keterlibatan ekonomi dengan keduanya. Hal ini menunjukkan oportunisme berprinsip yang canggih, dalam prinsip kedaulatan, non-blok, dan kehati-hatian fiskal mendikte keterlibatan oportunistik (Mainali 2022, 3). Bagi negara-negara kecil, *hedging* yang efektif menuntut pemahaman mendalam tentang daya ungkit dan tujuan spesifik dari setiap kekuatan besar, bersama dengan fleksibilitas untuk menerapkan berbagai strategi tandingan, daripada pendekatan yang sama untuk semua.

Perbedaan penting yang perlu dibuat di sini adalah perbedaan antara risiko keamanan dan ancaman keamanan karena risiko keamanan menghasilkan kebijakan *hedging* sementara ancaman keamanan dikaitkan dengan *balancing* dan *bandwagoning*. Hal ini dapat membantu dalam memahami apakah respons Nepal terhadap ketidakamanan yang berasal dari India dapat dianggap sebagai *hedging* atau *balancing*. Mengacu pada karya Strachan-Morris (2012), ancaman

didefinisikan dalam hal kemampuan dan niat sedangkan risiko mempertimbangkan kemungkinan dan bahaya. Jika seorang aktor memiliki kemampuan dan menyampaikan niatnya, ada kemungkinan besar bahwa referensi keamanan akan berada dalam bahaya (Mainali 2022, 7). Hal ini menyiratkan rasa urgensi seperti yang ditunjukkan ketika negara-negara menetapkan tingkat ancaman, misalnya, ketika kelompok teroris menunjukkan niat mereka untuk menyerang, dan kemampuan mereka dapat dinilai dari keberhasilan serangan mereka sebelumnya. Di sisi lain, risiko mengacu pada kemungkinan suatu peristiwa dan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkannya. Perbedaan antara keduanya dapat menjadi sulit terutama dalam konteks internasional dan domestik yang terus berkembang seperti Nepal.

3.2 Keterlibatan dalam Politik dan Diplomati

Menurut Gerstl, upaya keterlibatan politik dan diplomati yang dirancang untuk meyakinkan kekuatan yang bersaing sambil menghindari keselarasan yang nyata (Gerstl 2022, 19–20). Diplomasi Nepal terhadap BRI mencerminkan pendekatan ini dengan cara menandatangani Nota Kesepahaman BRI pada tahun 2017, Nepal telah terlibat dalam pertukaran diplomati tingkat tinggi secara berkala dengan Tiongkok, berpartisipasi dalam forum BRI, dan berkomitmen pada proyek konektivitas dan pembangunan. Pemerintah sering kali membingkai partisipasinya dalam BRI sebagai sesuatu yang didorong oleh tujuan pembangunan ekonomi, bukan pertimbangan geopolitik (Jie and Wallace 2021). Pemingkai ini terbukti dalam pernyataan resmi dan wacana publik, para pembuat kebijakan menekankan

tradisi Nepal yang tidak berpihak dan komitmennya yang setara untuk menjaga hubungan yang seimbang dengan India, Amerika Serikat, dan lembaga multilateral.

Pada saat yang sama, Nepal berupaya mengelola kekhawatiran dari aktor eksternal lainnya, terutama India dan Amerika Serikat, dengan menegaskan kembali bahwa keterlibatannya dalam BRI tidak akan menghasilkan keselarasan strategis dengan Tiongkok. Para pemimpin Nepal secara konsisten meyakinkan India tentang netralitas negara mereka dan menekankan bahwa Nepal akan tetap berada di luar pakta keamanan apa pun yang terkait dengan BRI. Diplomasi *omnidirectional* ini memungkinkan Nepal untuk terlibat secara ekonomi dengan Tiongkok sambil mempertahankan fleksibilitas politik dan strategisnya, yang mencerminkan strategi *hedging* yang diamati di Malaysia dan Vietnam (Gerstl 2022, 57–58; 101–102).

Dalam dekade terakhir, Tiongkok telah meningkatkan hubungannya dengan Pakistan, Sri Lanka, Maladewa, Bangladesh, dan Nepal, semua negara yang berdekatan dengan India dan sebagian besar dianggap berada dalam lingkup pengaruh India. Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) telah berinvestasi dan mengembangkan infrastruktur di negara-negara ini, yang beberapa di antaranya berada di bawah kendali Tiongkok sepenuhnya dan memiliki kemampuan penggunaan militer (Brakman et al., 2019).

Berdasarkan ringkasan dari dokumen "India-Nepal Joint Statement during the State Visit of Prime Minister of India to Nepal (May 11-12, 2018)", berikut adalah bagian-bagian yang menunjukkan indikasi *hedging* Nepal:

1. Penekanan pada 'Kesetaraan, Kepercayaan, dan Saling Menguntungkan' (Equality, Trust, and Mutual Benefit):

- a. Ringkasan menyatakan: "*They also emphasized strengthening cooperation in various sectors for socio-economic development, based on equality, trust, and mutual benefit.*"
 - b. Mengapa poin (a) menunjukkan *hedging*: Ketika sebuah negara kecil berinteraksi dengan kekuatan yang lebih besar, penekanan pada 'kesetaraan' dan 'saling menguntungkan' adalah indikasi kuat bahwa Nepal berhati-hati untuk tidak menjadi subordinat atau terlalu bergantung. Ini adalah bagian dari komponen 'Persepsi Risiko dan Peluang' serta 'Keterlibatan Politik-Diplomatik' dalam *hedging*, di mana Nepal berusaha memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak merugikan kedaulatannya atau menciptakan ketergantungan asimetris. Ini menunjukkan bahwa Nepal menginginkan hubungan yang seimbang, bukan dominasi.
2. Mengatasi defisit perdagangan dan meminta peninjauan perjanjian perdagangan:
- a. Ringkasan menyatakan: "*The Prime Ministers addressed Nepal's trade deficit with India and agreed to review the bilateral Treaty of Trade and consider amendments to facilitate Nepal's access to the Indian market and enhance overall trade and transit.*"
 - b. Mengapa poin (a) menunjukkan *hedging*: Permintaan untuk meninjau perjanjian perdagangan dan memfasilitasi akses pasar bagi Nepal menunjukkan bahwa Nepal secara aktif mencari hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ini adalah tindakan proaktif dalam 'Keterlibatan Ekonomi'

untuk mengurangi risiko ketergantungan ekonomi yang tidak sehat pada India dan mencari kondisi yang lebih adil, yang merupakan inti dari strategi *hedging* untuk mendiversifikasi atau menyeimbangkan manfaat ekonomi.

Meskipun pernyataan bersama ini berfokus pada hubungan dengan India (yang merupakan satu 'raksasa' di samping Tiongkok), cara Nepal menegosiasikan dan menekankan aspek-aspek tertentu dalam hubungan ini menunjukkan pola kehati-hatian dan upaya untuk menjaga otonomi. Ini adalah bagian dari strategi *hedging* yang lebih luas, di mana Nepal tidak hanya mencari mitra baru (seperti Tiongkok) tetapi juga secara aktif mengelola hubungan dengan mitra tradisionalnya (India) untuk memastikan keseimbangan (Ministry of External Affairs 2018).

3.3 Keterlibatan dalam Ekonomi

Dengan *hedging strategy*, Nepal telah memperoleh serangkaian manfaat substansial, yang paling intuitif adalah dalam aspek ekonomi. Investasi langsung Tiongkok di Nepal telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Data pertumbuhan investasi total menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2020-2021 yang berakhir pada pertengahan Juli 2023, Tiongkok berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 22,5 miliar rupee Nepal di Nepal; itu mencakup sekitar 70% dari total investasi yang dilakukan oleh investor asing di Nigeria pada tahun fiskal tersebut, menduduki peringkat pertama selama enam tahun berturut-turut; bantuan India ke Nepal telah melonjak sebesar 73% sebagai respons terhadap kemajuan pesat pembangunan infrastruktur Tiongkok (Chong 2023, 361). Peningkatan nilai

substansial ekonomi ini merupakan bentuk contoh kecil dari *hedging strategy* yang dilakukan Nepal

Perdagangan Nepal, khususnya dengan Tiongkok, menurun secara mengkhawatirkan. Selama blokade berlangsung, ekspor ke Tiongkok turun hingga 69% dibandingkan dengan 40% dengan India dan 9% dengan seluruh dunia (Kharel 2018, 4). Impor dari India selama blokade turun hingga 28% dibandingkan dengan 20% dari Tiongkok dengan bahan bakar dan obat-obatan menjadi yang paling terpuak karena impor yang terakhir berkurang hingga 46% (Kharel 2018, 9; Sharma et al., 2017). Perdagangan dengan Tiongkok mengalami penurunan paling drastis karena satu-satunya jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor ke Tiongkok dari Nepal hancur oleh gempa bumi dan jalur laut tidak dapat diakses karena blokade. Bencana ganda tersebut dengan jelas menekankan perlunya mengejar lebih banyak opsi perdagangan untuk meminimalkan kerusakan jika potensi blokade di selatan terwujud sekali lagi.

Mengatasi masalah ini, Nepal telah memperdalam hubungan perdagangan mereka dengan Tiongkok. Sebelum tahun 2015, *Tatopani custom point* menangani seperempat impor dari Tiongkok sementara 50% lainnya melalui pelabuhan India dan kemudian ke Tiongkok (Kharel 2018, 14). Untuk mengurangi ketergantungan mereka pada rute-rute ini, Nepal lebih jauh mengembangkan *Rasuwagadhi custom point*, dan kini telah berfungsi sebagai rute perdagangan utama lainnya bagi Nepal dan Tiongkok. Pada tahun 2019, Nepal juga menandatangani Perjanjian Transit dan Transportasi yang memungkinkan akses ke tujuh pelabuhan laut dan darat di Tiongkok yang dapat digunakan untuk perdagangan negara ketiga (Mainali 2022, 11). Hal ini sangat penting karena Nepal telah sepenuhnya bergantung pada

pelabuhan-pelabuhan India untuk perdagangan dengan seluruh dunia. Dominasi India selanjutnya juga telah berkurang pada tahun 2015 ketika Nepal menandatangani kesepakatan minyak bersejarah dengan Tiongkok yang memutus monopoli empat dekade Indian Oil Corporation di Nepal yang sangat merugikan selama blokade (Mainali 2022, 11). Yang paling penting, Nepal menandatangani BRI pada tahun 2017 dan sebuah proyek bertajuk Jaringan Konektivitas Multidimensi Trans-Himalaya diperkenalkan untuk menciptakan hubungan antara kedua negara. Proyek utama ini adalah menghubungkan kedua negara melalui jalur kereta api yang akan semakin memperlancar perdagangan.

3.4 *Limited Balancing*

Sementara negara-negara kecil seperti Nepal tidak memiliki kemampuan militer untuk melakukan *direct balancing*, mereka dapat melakukan *limited balancing* dengan mempertahankan hubungan keamanan yang sederhana dengan kekuatan pesaing untuk mempertahankan opsi-opsi strategis. Gerstl menggambarkan perilaku ini sebagai bentuk *hedging* yang memungkinkan negara-negara untuk mengisyaratkan kemerdekaan dan mempertahankan kemitraan keamanan alternatif (Gerstl 2022, 38).

Perilaku *limited balancing* Nepal terkait dengan BRI melibatkan pemeliharaan hubungan keamanan yang tidak terlalu mencolok dengan India, berpartisipasi dalam operasi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terlibat dalam kerja sama kemanusiaan dan bantuan bencana dengan Amerika Serikat dan mitra-mitra Barat lainnya (Shekhawat 2025). Hal yang terpenting, Nepal menolak untuk memperdalam kerja sama keamanan dengan Tiongkok atau

bergabung dengan inisiatif militer yang dipimpin Tiongkok. Meskipun Nepal menyambut baik investasi Tiongkok di bawah BRI, negara itu menghindari partisipasi dalam latihan militer gabungan atau dialog strategis yang dapat membahayakan kebijakan strategi *hedging* yang telah lama berlaku.

Pelestarian hubungan keamanan sederhana dengan kekuatan lain ini mencerminkan strategi *limited balancing* yang terlihat di Filipina di bawah Duterte. Oleh karena itu, Manila mempertahankan hubungan pertahanannya dengan Amerika Serikat meskipun keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok semakin dalam (Gerstl 2022, 80–81).

3.5 *Limited Bandwagoning*

Komponen terakhir dari kerangka kerja Gerstl menyangkut *limited bandwagoning* dengan kekuatan besar. Strategi *hedging* yang berhasil melibatkan keterlibatan ekonomi dengan kekuatan seperti Tiongkok sambil menahan godaan untuk mengadopsi posisi kebijakan luar negeri atau prioritas keamanannya (Gerstl 2022, 41).

Perilaku Nepal dalam konteks BRI menunjukkan prinsip ini. Meskipun berpartisipasi dalam BRI dan menerima investasi Tiongkok, Nepal menolak inisiatif kerja sama keamanan yang terkait dengan BRI dan menjaga jarak retorika yang hati-hati dari narasi strategis Beijing. Pejabat Nepal secara konsisten menegaskan kembali komitmen mereka untuk tidak berpihak, menekankan bahwa keterlibatan Nepal dengan BRI murni bersifat ekonomi dan tidak akan mengarah pada partisipasi dalam pengaturan keamanan atau geopolitik apa pun (Adhikari 2022, 478–479). Nepal juga menjaga hubungan diplomatiknya dengan mitra utama lainnya, termasuk India, Amerika Serikat, Jepang, dan organisasi multilateral.

Upaya yang disengaja untuk menjaga hubungan yang seimbang sambil menolak tekanan keberpihakan ini mencerminkan strategi *limited bandwagoning* yang dipraktikkan oleh negara-negara ASEAN dan didokumentasikan oleh Gerstl (2022, 42–43).

Tabel 2. Komponen dan kriteria *hedging* Nepal kepada Tiongkok

Component	Criteria
<i>Why does Nepal hedge?</i>	
<i>Nepal's perception of risk and opportunities related to China</i>	<p><i>Risk:</i> keamanan: Akan ada dampak lingkungan dan sosial yang rusak karena pembangunan dalam skala besar, yang menjadi salah satu ancaman keamanan bagi masyarakat Nepal. Ekonomi: “<i>Debt trap diplomacy</i>” dan utang yang tidak berkelanjutan, potensi hilangnya otonomi dan ketergantungan asimetris. Politik dalam negeri: Kritik keras dari masyarakat Nepal yang membuat ketidakseimbangan di politik internal Nepal, berujung penundaan pelaksanaan rencana proyek dari BRI.</p>
<i>Perception of the strategic value of other great powers and international organizations</i>	<p><i>Opportunities:</i> Pengembangan infrastruktur yang signifikan (jalan raya, rel kereta api, jalur transmisi lintas batas), peningkatan konektivitas ke pasar yang besar, akses ke investasi dan teknologi, diversifikasi kemitraan ekonomi, potensi pertumbuhan ekonomi yang substansial, dan integrasi regional.</p>
<i>How does Nepal hedge?</i>	
<i>Politic-diplomatic engagement</i>	<p><i>Depth of political-diplomatic relations</i> Partisipasi aktif dalam diskusi BRI, kunjungan tingkat tinggi, kesepakatan mengenai berbagai kerangka kerja sama, keterlibatan dengan perusahaan milik negara Tiongkok, tetapi juga manuver diplomatik yang hati-hati untuk menunda proyek berbasis pinjaman dan menekankan bantuan berbasis hibah.</p>
<i>Economic engagement</i>	<i>Depth of economic relations</i>

Menandatangani kerangka kerja BRI, mengidentifikasi dan mendiskusikan sepuluh proyek (meskipun hanya sedikit yang terwujud dalam implementasi skala besar karena negosiasi keuangan), meningkatkan perdagangan dan pariwisata, mencari investasi Tiongkok. Penekanan pada hibah daripada pinjaman untuk proyek BRI mencerminkan pendekatan *hedging* ekonomi yang hati-hati.

Limited balancing

Status of security relations

Penerimaan hibah MCC, yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai penangkal pengaruh BRI; mempertahankan hubungan tradisional yang kuat dengan India untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada Tiongkok; diversifikasi pembelian pertahanan dan program pelatihan untuk menghindari penyelarasan eksklusif dengan kekuatan tunggal mana pun.

Limited bandwagoning

Status of security relations cooperation (security and related political agreements with hedging target)

Antusiasme awal terhadap BRI pada tahun 2017, mengupayakan proyek pengembangan infrastruktur dan konektivitas, meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok, memandang Tiongkok sebagai sumber utama investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Data diolah penulis, mengadopsi Alfred Gerstl 2022.

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara fundamental menyoroti upaya adaptif Nepal, sebuah negara terkurung daratan yang strategis, dalam menavigasi kompleksitas geopolitik Asia Selatan yang dinamis. Berada di antara dua kekuatan adidaya yang sedang bangkit, India dan Tiongkok, Nepal dihadapkan pada dilema krusial untuk menjaga kedaulatan dan memajukan kepentingan nasionalnya di tengah tawaran inisiatif pembangunan berskala besar. Penelitian ini berfokus pada respons Nepal terhadap *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dari Amerika Serikat dan *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Republik Rakyat Tiongkok, menggunakan kerangka strategi *hedging* Alfred Gerstl untuk mengurai pilihan kebijakan luar negeri Nepal dari tahun 2017 hingga 2024. Melalui lensa teori *hedging*, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Nepal berupaya mengelola risiko dan memaksimalkan peluang dari keterlibatannya dengan kedua inisiatif tersebut.

Secara historis, kebijakan luar negeri Nepal telah dibentuk oleh kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan hubungan dengan India dan Tiongkok. Meskipun secara tradisional memiliki ketergantungan yang kuat pada India karena kedekatan geografis dan ikatan ekonomi, Nepal secara konsisten telah berupaya mendiversifikasi hubungan eksternalnya untuk menghindari dominasi tunggal. Kebijakan *hedging* Nepal pasca-Perang Dingin, dan kini, keterlibatan dengan MCC dan BRI, dapat dilihat sebagai kelanjutan dari upaya ini. MCC, yang menawarkan hibah signifikan untuk infrastruktur energi dan transportasi, dan BRI, dengan janji investasi masif dalam konektivitas regional, secara bersamaan memberikan peluang pembangunan vital dan tantangan geopolitik. Perdebatan politik internal yang

intens seputar ratifikasi MCC dan hambatan dalam implementasi proyek BRI menyoroti sensitivitas dan kompleksitas upaya Nepal untuk menerima bantuan asing tanpa mengorbankan otonomi strategisnya.

Kondisi sosio-ekonomi dan geografis Nepal secara signifikan membentuk responsnya terhadap MCC dan BRI. Sebagai salah satu negara termiskin di Asia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif rendah, serta menghadapi tantangan infrastruktur yang parah di tengah medan pegunungan yang rentan bencana, Nepal sangat membutuhkan investasi eksternal. Kebutuhan ini menjadikan tawaran pembangunan dari MCC dan BRI sangat menarik. Namun, kerentanan internal ini juga memperbesar kekhawatiran tentang jebakan utang BRI atau potensi kondisi yang memberatkan dari MCC. Demografi Nepal yang didominasi kaum muda juga membutuhkan penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi, menambah urgensi bagi pemerintah untuk memanfaatkan investasi asing secara efektif demi stabilitas sosial.

Inisiatif MCC dan BRI, meskipun berbeda dalam sifat dan tujuannya, secara kolektif menempatkan Nepal pada posisi yang unik. MCC, sebagai program hibah yang berfokus pada tata kelola yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dipandang oleh beberapa pihak sebagai alat untuk menekan pengaruh Tiongkok, memicu perdebatan kedaulatan di Nepal. Di sisi lain, BRI Tiongkok, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menawarkan jalur potensial untuk mengatasi ketergantungan Nepal pada India, namun dengan risiko inheren berupa peningkatan utang dan ketergantungan pada Beijing. Respons Nepal terhadap kedua inisiatif ini mencerminkan upaya yang disengaja untuk memetik

keuntungan dari keduanya sambil mempertahankan ruang gerak di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin meningkat.

Menerapkan kerangka *hedging* Alfred Gerstl, penelitian ini berargumen bahwa tindakan Nepal selaras dengan komponen-komponen utama strategi ini. Pertama, Nepal menunjukkan persepsi risiko dan peluang yang cermat, mengakui kebutuhan akan investasi tetapi waspada terhadap potensi ancaman kedaulatan atau ketergantungan. Kedua, Nepal secara aktif membangun persepsi nilai strategis potensial selain AS dan Tiongkok, seperti India dan negara-negara lain, untuk mendiversifikasi opsi. Ketiga, Nepal terlibat dalam keterlibatan politik-diplomatik yang hati-hati, bernegosiasi secara ekstensif dan menunda keputusan untuk mengamankan persyaratan yang lebih baik dan menjaga keseimbangan. Keempat, keterlibatan ekonomi yang pragmatis terlihat dari upaya Nepal untuk menerima investasi dari kedua belah pihak sambil mencoba mendiversifikasi jalur perdagangan. Terakhir, Nepal mempertahankan keterlibatan keamanan yang terbatas, menjalin kerja sama militer dengan berbagai negara seperti AS dan India tanpa membentuk aliansi yang mengikat, sebagai asuransi terhadap risiko yang tidak dapat diantisipasi.

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa strategi *hedging* Nepal dalam menghadapi MCC dan BRI dapat dicirikan sebagai pendekatan yang sebagian besar reaktif terhadap peristiwa dan tekanan eksternal, namun juga memiliki tingkat kohesivitas dalam tujuannya untuk menjaga otonomi dan mengurangi ketergantungan. Strategi ini sering kali muncul sebagai strategi tanpa alternatif yang jelas, mengingat keterbatasan pilihan negara kecil di antara kekuatan besar. Namun, strategi ini belum sepenuhnya kuat (*robust*), karena Nepal masih

menghadapi tantangan signifikan dalam mendiversifikasi ekonomi dari dominasi India dan dalam menjaga stabilitas politik internal yang diperlukan untuk implementasi kebijakan yang konsisten.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi *hedging* Nepal merupakan respons logis dan pragmatis terhadap dilema geopolitik yang dihadapinya. Meskipun strateginya seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan respons terhadap tekanan eksternal, Nepal secara aktif berupaya untuk menyeimbangkan kepentingannya di tengah persaingan antara AS dan Tiongkok. Keberhasilan jangka panjang strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan Nepal untuk mengkonsolidasikan konsensus domestik, memperkuat kapasitas kelembagaannya, dan terus-menerus menyesuaikan diri dengan lanskap geopolitik yang berubah. Studi kasus Nepal ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang teori *hedging* tetapi juga menawarkan wawasan penting bagi negara-negara kecil lainnya yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan pembangunan di tengah persaingan pengaruh global yang intens.

Tabel 3. Komponen dan kriteria *hedging* Nepal kepada Amerika Serikat dan Tiongkok

Komponen	Kriteria	
<i>Why does Nepal hedge?</i>	Amerika Serikat:	Tiongkok:
<p><i>Nepal's perception of risk and opportunities related to USA and PRC</i></p>	<p>Risk: Keamanan: Nepal Takut memprovokasi Tiongkok, membahayakan hubungan keamanan dan stabilitas perbatasan. Ekonomi: Risiko membahayakan investasi dan bantuan Tiongkok di bawah BRI. Politik Dalam Negeri: Persaingan internal yang intens, protes, narasi oposisi yang membingkai MCC sebagai neokolonial, mengancam kedaulatan nasional.</p>	<p>Risk: keamanan: Akan ada dampak lingkungan dan sosial yang rusak karena pembangunan dalam skala besar, yang menjadi salah satu ancaman keamanan bagi masyarakat Nepal. Ekonomi: “<i>Debt trap diplomacy</i>” dan utang yang tidak berkelanjutan, potensi hilangnya otonomi dan ketergantungan asimetris Politik dalam negeri: Kritik keras dari masyarakat Nepal yang membuat ketidakseimbangan di politik internal Nepal, berujung penundaan pelaksanaan rencana proyek dari BRI.</p>
<p><i>Perception of the strategic value of other great powers and international organizations</i></p>	<p>Opportunities: Pembangunan Ekonomi: Hibah infrastruktur senilai \$500 juta untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur listrik dan jalan. Otonomi Strategis: Diversifikasi keterlibatan negara adikuasa; hindari ketergantungan yang berlebihan. <i>Diplomatic Leverage:</i> menggunakan penerimaan MCC untuk mengisyaratkan keterbukaan terhadap negara barat sambil menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok.</p>	<p>Opportunities: Pengembangan infrastruktur yang signifikan (jalan raya, rel kereta api, jalur transmisi lintas batas), peningkatan konektivitas ke pasar yang besar, akses ke investasi dan teknologi, diversifikasi kemitraan ekonomi, potensi pertumbuhan ekonomi yang substansial, dan integrasi regional.</p>

How does Nepal hedge?

Politic-diplomatic engagement

Depth of political-diplomatic relations

Pemeliharaan hubungan politik dan kepastian diplomatik terhadap berbagai kekuatan besar.

Menegaskan MCC sebagai pembangunan; meyakinkan Tiongkok mengenai ketidakberpihakan Nepal dan komitmen BRI; memperpanjang ratifikasi untuk manuver diplomatik.

Depth of political-diplomatic relations

Partisipasi aktif dalam diskusi BRI, kunjungan tingkat tinggi, kesepakatan mengenai berbagai kerangka kerja sama, keterlibatan dengan perusahaan milik negara Tiongkok, tetapi juga manuver diplomatik yang hati-hati untuk menunda proyek berbasis pinjaman dan menekankan bantuan berbasis hibah.

Economic engagement

Depth of economic relations

Menerima hibah MCC sambil melanjutkan proyek BRI; membingkai inisiatif sebagai pelengkap; menjaga fleksibilitas ekonomi.

Depth of economic relations

Menandatangani kerangka kerja BRI, mengidentifikasi dan mendiskusikan sepuluh proyek (meskipun hanya sedikit yang terwujud dalam implementasi skala besar karena negosiasi keuangan), meningkatkan perdagangan dan pariwisata, mencari investasi Tiongkok. Penekanan pada hibah daripada pinjaman untuk proyek BRI mencerminkan pendekatan *hedging* ekonomi yang hati-hati.

Limited balancing

Status of security relations

Mempertahankan kerja sama militer/keamanan sederhana dengan kekuatan eksternal untuk pilihan strategis.

Pelatihan penjagaan perdamaian, latihan tanggap bencana, kerja sama keamanan kecil dengan AS;

Status of security relations

Penerimaan hibah MCC, yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai penangkal pengaruh BRI; mempertahankan hubungan tradisional yang kuat dengan India untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada Tiongkok;

	tidak ada dimensi militer bagi MCC; menghindari penyelarasan formal.	diversifikasi pembelian pertahanan dan program pelatihan untuk menghindari penyelarasan eksklusif dengan kekuatan tunggal mana pun.
<i>Limited bandwagoning</i>	<p><i>Status of security relations cooperation (security and related political agreements with hedging target)</i> Menghindari keberpihakan sepihak; mempertahankan otonomi kebijakan dalam masalah strategis.</p> <p>Menolak MCC sebagai bagian dari Strategi Indo-Pasifik AS; mempertahankan non-keberpihakan; menghindari subordinasi keamanan/kebijakan luar negeri ke Tiongkok atau AS.</p>	<p><i>Status of security relations cooperation (security and related political agreements with hedging target)</i> Antusiasme awal terhadap BRI pada tahun 2017, mengupayakan proyek pengembangan infrastruktur dan konektivitas, meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok, memandang Tiongkok sebagai sumber utama investasi dan pertumbuhan ekonomi.</p>

Sumber: Data diolah penulis, mengadopsi Alfred Gerstl 2022.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian berjudul “*Hedging Between Giants: Analisis Kebijakan Luar Negeri Nepal dalam Menghadapi Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok (2017-2024)*”. Keterbatasan sumber data harus menjadi catatan penting bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian harus bisa lebih tajam dan mendalam dalam menganalisis isu menggunakan teori maupun konsep yang ada, diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih memahami perbedaan teori *hedging strategy* yang satu dan lainnya seperti teori *hedging strategy* yang dikonsepsikan oleh Haacke dan juga Grets, terutama dengan yang akan digunakan sehingga akan lebih matang dan mendalam analisisnya.

Daftar Pustaka

Amatya, Kripendra. 2020. "The MCC and Nepal's Strategic Ties With the US." *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*.

<https://thediplomat.com/2020/02/the-mcc-and-nepals-strategic-ties-with-the-us/>.

Amir, Syed R. 2023. "Nepal-China Relations and Belt and Road Initiative." *Modern Diplomacy*.

<https://moderndiplomacy.eu/2023/01/23/nepal-china-relations-and-belt-and-road-initiative/>.

Anupam, Birat. 2024. "Nepal and China Identify 10 Projects for Execution Under BRI." *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/12/nepal-and-china-identify-10-projects-for-execution-under-bri/>.

Basnet, Pragyan. 2021. "MCC Nepal: A Leap toward Prosperity or a Surrender of Sovereignty?" *My Republica*.

<https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/mcc-nepal-a-leap-toward-prosperity-or-a-surrender-of-sovereignty?>

Bastola, Sabina. 2025. "Foreign Policy of Nepal: Strategic Approach to Sovereignty." *Unity Journal* 6, no. 1 (February): 235-247.

Bhattarai, Kamal D. 2019. "Nepal's Delicate Dance with China on BRI." *southasianvoices.org*. <https://southasianvoices.org/nepals-delicate-dance-with-china-on-bri/>.

Bhole, Omkar. 2025. "BALANCING THE HIMALAYAN NEIGHBOURS: UNPACKING NEPAL'S PUBLIC PERCEPTION OF INDIA AND CHINA." *ORCA | Organisation for Research on China and*

Asia. <https://orcasia.org/public/article/1110/balancing-the-himalayan-neighbours-unpacking-nepals-public-perception-of-india-and-china>.

Bhusal, Thaneshwar. 2023. "Nepa's participatory governance in diverse political systems: a comparative perspective." *Asian Journal of Political Science* 31 (3): 255 - 272.

<https://doi.org/10.1080/02185377.2023.2285288>.

Bishwakarma, Jham K. 2018. "BRI from a Nepalse Perspective." chinadaily.com.cn.

<https://global.chinadaily.com.cn/a/201812/15/WS5c14ae61a3107d4c3a001012.html>.

Chand, Hari. 2021. "Nepal's Engagement in BRI and MCC: Implications on Nepal's Geopolitics and Foreign Policy." *Journal of Political Science* Vol. 21 (August).

https://www.researchgate.net/publication/354064428_Nepal's_Engagement_in_BRI_and_MCC_Implications_on_Nepal's_Geopolitics_and_Foreign_Policy.

Chong, Wang. 2023. "The Strategic Hedging of Nepal under the Competition of China and India." *The International Conference on Interdisciplinary Humanities and Communication Studies* 5, no. 1 (Mei): 358-363. <http://dx.doi.org/10.54254/2753-7048/5/20220566>.

Dhakal, Binod. 2025. "Pokhara International Airport Scandal: Uncovering Foul Play in China-Loaned BRI Project." Nepal News. Pokhara International Airport Scandal: Uncovering Foul Play in China-Loaned BRI

Project <https://nepalnews.com/s/explainers/pokhara-international-airport-scandal-uncovering-foul-play-in-china-loaned-bri-project/>.

EPARDAFAS. 2024. "BRI Concerns Escalate: Pokhara Residents Say 'No' to Chinese Influence." English Pardafas.

<https://english.pardafas.com/bri-concerns-escalate-pokhara-residents-say-no-to-chinese-influence/>.

Ganguly, Mahesh, and Raza Siddiqui. 2025. "How the US Aid Freeze Shook up the Geopolitics of Nepal's Power Trade." *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*. <https://thediplomat.com/2025/03/how-the-us-aid-freeze-shook-up-the-geopolitics-of-nepals-power-trade/>.

Gerstl, Alfred. 2022. *Hedging Strategies in Southeast Asia: ASEAN, Malaysia, the Philippines, and Vietnam and Their Relations with China*. N.p.: Routledge, Taylor & Francis Group.

Goh, Evelyn. 2005. "Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies." Edited by Muthiah Alagappa. *East-West Center*, (January), 82.

Gonzalez-Pujol, Iván. 2024. "Theorising the Hedging Strategy: National Interests, Objectives, and Mixed Foreign Policy Instruments." *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace* 13, no. 2 (May): 193-214.

Gupta, Rishi. 2023. "Nepal's Geopolitical Crossroads: Balancing China, India, and the United States." Asia Society. <https://asiasociety.org/policy-institute/nepals-geopolitical-crossroads-balancing-china-india-and-united-states>.

Jie, Dr. Yue, and Jon Wallace. 2021. "What is China's Belt and Road Initiative (BRI)?" Chatham House.

<https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri>.

Johny, Eby. 2024. "Foreign policy strategies of Nepal between China and India: bandwagon or hedging." (Januari). <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00560-1>.

Kc, Khadga, and Hari P. Chand. 2024. "The Reality and Myth of the BRI's "Debt Trap": Evidence from Nepal." *The Reality and Myth of BRI's Debt Trap: Evidences from Asia and Africa*, (April), 185-202.

Khanal, Gopal. 2024. "Amity to all, enmity to none." [theannapurnaexpress.com](https://theannapurnaexpress.com/story/50294/). <https://theannapurnaexpress.com/story/50294/>.

Kharel, Paras. n.d. "From Tatopani to Rasuwa: An analysis of Nepal-China trade after the earthquake." *South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE)* 1 (9): 64.

Liang, Gao. 2022. "Nepal's geopolitical dilemma." *The Kathmandu Post*. <https://kathmandupost.com/columns/2022/07/17/nepal-s-geopolitical-dilemma>.

Mainali, Raunak. 2022. "Analysing Nepal's Foreign Policy: A Hedging Perspective." *Journal of Asian Security and International Affairs* 9 (2): 1-17. [10.1177/23477970221098491](https://doi.org/10.1177/23477970221098491).

Maizland, Lindsay, and Andrew Chatzky. 2023. "China's Massive Belt and Road Initiative." Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>.

Maskey, Dr. Mahesh. 2024. "Nepal's Fight for Sovereignty, the Millennium Challenge Corporation, and the US's New Cold War against China." Edited by Bampanth. *Tricontinental Interventions: Conjunctural Analysis from Asia 1* (September): 36.

Millennium Challenge Corporations. 2024. "Features of the Nepal Compact." Millennium Challenge Corporation USA.

<http://www.mcc.gov/where-we-work/program/nepal-compact>.

The Minister of Finance of The Federal Democratic Republic of Nepal. 2017. *Millennium Challenge Compact*.

Ministry of External Affairs. 2018. "India-Nepal Joint Statement during the State Visit of Prime Minister of India to Nepal (May 11-12, 2018)."

Ministry of External Affairs Government of India, May 12, 2018.

<https://www.mea.gov.in/bilateral->

[documents.htm?dtl/29894/IndiaNepal_Joint_Statement_during_the_State_Visit_of_Prime_Minister_of_India_to_Nepal_May_1112_2018](https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/29894/IndiaNepal_Joint_Statement_during_the_State_Visit_of_Prime_Minister_of_India_to_Nepal_May_1112_2018).

Ministry of Foreign Affairs Nepal. 2019. "Nepal-China Relations – Ministry of Foreign Affairs Nepal MOFA." Ministry of Foreign Affairs Nepal MOFA. <https://mofa.gov.np/nepal-china-relations/>.

Navari, Cornelia. 2016. "Hans Morgenthau and the National Interest."

Ethics & International Affairs Vol. 30 (01): pp. 47-54.

Poudel, Purushottam. 2025. "Differences in ruling Congress over new BRI framework deal." The Kathmadu Post.

<https://kathmandupost.com/national/2024/12/06/differences-in-ruling-congress-over-new-bri-framework-deal>.

Proud, Richard R., and Pradyumna P. Karan. 2025. "Nepal - Himalayas, Monarchy, Unification." Britannica.

<https://www.britannica.com/place/Nepal/History>.

Rana, Prayana S. 2021. "To MCC or not to MCC - The Record." The Record Nepal. <https://www.recordnepal.com/to-mcc-or-not-to-mcc?>

Sadeghi, Amin. 2018. "Anarchic Orders and Balances of Power Waltz, 1979: A Master Student's Interpretation."

Shekhawat, Shivam. 2025. "The MCC Debate and U.S.-Nepal Ties in Flux." OBSERVER RESEARCH FOUNDATION.

<https://www.orfonline.org/research/the-mcc-debate-and-u-s-nepal-ties-in-flux>.

Shrestha, Prithvi M. 2023. "Nepal's Declaration on MCC Compact gets US Nod." The Kathmandu Post.

<https://kathmandupost.com/national/2023/08/30/nepal-s-declaration-on-mcc-compact-gets-us-nod>.

Silwal, Raju. 2024. "One year of implementation of MCC sees progress as expected." Nepal News. <https://nepalnews.com/s/capital/one-year-of-implementation-of-mcc-sees-progress-as-expected/>.

Subedi, Ritu R. 2021. "US' MCC grant most divisive issue In Nepal." Global Times. <https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241535.shtml>.

Tepperman, Jonathan. 2016. *The Fix: How Nations Survive and Thrive in a World in Decline*. N.p.: Tim Duggan Books.

Thapa, Santa B. 2024. "Millennium Challenge Corporation and Belt and Road Initiative: Reshaping South Asian Politics." *Open Journal of*

Political Science, no. 14 (Oktober), 551-566.

<https://doi.org/10.4236/ojps.2024.144031>.

Woo, Ryan. 2024. "In pivot from India, Nepal PM seeks economic support from China." Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pivot-india-nepal-pm-visits-china-seek-investment-2024-12-03/>.

Zuberi, Matinuzzaman, Richard Riseley, and Pradyumna P. Karan. 2025. "Nepal | History, Population, Flag, Language, Map, & Facts." Britannica. <https://www.britannica.com/place/Nepal>.